

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 07 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional PER.05/MEN.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan perlunya pemantauan terhadap perkembangan dan proses pelaksanaan program/kegiatan di Kementerian PPN/Bappenas agar lebih efektif, efisien, proporsional, dan berkesinambungan.

Pemantauan merupakan suatu pengamatan dan/atau pencermatan yang dilakukan secara terus menerus atau berkala untuk menyediakan informasi tentang status perkembangan suatu program/kegiatan, serta mengidentifikasi permasalahan yang timbul dan merumuskan tindak lanjut yang dibutuhkan. Pemantauan dan evaluasi ini bertujuan untuk menjamin bahwa pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sehingga dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan rencana pembangunan di masa yang akan datang. Hasil pemantauan pelaksanaan program/kegiatan yang dilakukan oleh setiap penanggung jawab kegiatan, diharapkan hasilnya dapat berguna untuk menentukan tingkat pencapaian dan optimalisasi kapasitas program/kegiatan agar terarah pada pencapaian sasaran sesuai dengan tujuannya. Selain itu, hasil pemantauan dapat dijadikan sebagai bahan masukan penyusunan laporan evaluasi kinerja dan bahan penyempurnaan penyusunan perencanaan dalam keberlangsungan program/kegiatan.

Pemantauan pelaksanaan program/kegiatan dilakukan dalam upaya meningkatkan kinerja organisasi pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012, tentang Pedoman Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran di Kementerian PPN/Bappenas. Dalam Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas tersebut dijelaskan antara lain bahwa setiap Unit Kerja Eselon I (UKE I) dan Unit Kerja Eselon II (UKE II) sebagai penanggung jawab kegiatan dan pelaksana kegiatan serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) harus melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan (*self monitoring*). Hasil pemantauan tersebut disampaikan kepada Biro Perencanaan Organisasi dan Tata Laksana untuk disusun sebagai Laporan Pemantauan Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian PPN/Bappenas.

Laporan Pemantauan Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian PPN/Bappenas Triwulan I Tahun 2015 akan menggambarkan hasil realisasi pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran di Kementerian PPN/Bappenas selama 3 (tiga) bulan, dan laporan ini merupakan hasil akumulasi realisasi Bulan Januari sampai dengan Maret 2015.

## **B. TUJUAN**

Tujuan pemantauan pelaksanaan program/kegiatan di Kementerian PPN/Bappenas adalah:

1. Untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program/kegiatan, baik fisik maupun keuangan dalam rangka menjamin konsistensi antara pelaksanaan dengan rencana yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan program/kegiatan, baik terhadap tingkat perkembangan pelaksanaannya maupun manfaat yang ditargetkan dan hambatan atau kendala yang terjadi untuk diambil tindakan korektif sedini mungkin.
3. Untuk mendukung usaha penyempurnaan perencanaan berikutnya dengan menyediakan informasi tentang status perkembangan suatu program atau kegiatan yang sedang dilaksanakan, sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai secara efisien dan efektif.

## **C. DASAR DAN METODOLOGI PEMANTAUAN**

Pemantauan Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian PPN/Bappenas dilakukan berdasarkan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah
2. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengajuan Usulan, Penilaian, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri Hibah
3. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 07 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional PER.05/MEN.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

4. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor Nomor 02/M.PPN/06/2009 tentang Pengelolaan Pinjaman dan atau Hibah Luar Negeri Di Kementerian Negara PPN/Bappenas
5. Peraturan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2012, tentang Pedoman Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran di Kementerian PPN/Bappenas.
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2010-2014.
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 02 Tahun 2014 tentang Mekanisme Penyusunan Dokumen Perencanaan Serta Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pinjaman Luar Negeri dan Hibah di Kementerian PPN/Bappenas
8. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.49/M.PPN/HK/03/2015 tentang perubahan keempat atas Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.103/M.PPN/HK/12/2013 Tentang Pengangkatan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (SPM), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Satuan Kerja (BPA SATKER) Kementerian PPN/Bappenas.
9. Petunjuk Pelaksanaan Sesmen PPN/Sestama No. 1/Juklak/Sesmen/02/2014 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran di Kementerian PPN/Bappenas
10. Dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2015 Nomor: SP DIPA-055.01.1.017312/2015 untuk Satker Kementerian PPN/Bappenas dan DIPA-055.01.1.966009/2015 untuk Satker Pengelola Hibah MCC.

Laporan hasil pemantauan ini disusun sesuai dengan ketentuan dasar tersebut di atas dengan melakukan analisis deskriptif berdasarkan tabulasi/hasil pengolahan data realisasi penyerapan anggaran yang disampaikan oleh seluruh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Biro Umum berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Selanjutnya dijelaskan mengenai hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam proses pelaksanaan program/kegiatan dan proses pencairan dana.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (APBN)**

#### **KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN 2015**

##### **A. RANCANGAN TEKNOKRATIS RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019**

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Kementerian PPN/Bappenas menetapkan visi, misi, serta tujuan organisasi di dalam Rancangan Teknokratis Renstra 2015-2019. Visi tersebut adalah untuk ***“Mewujudkan Lembaga Perencanaan Pembangunan Nasional yang dapat menghasilkan Rencana Pembangunan Nasional yang berkualitas, Sinergis, dan kredibel demi mencapai tujuan negara yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”***

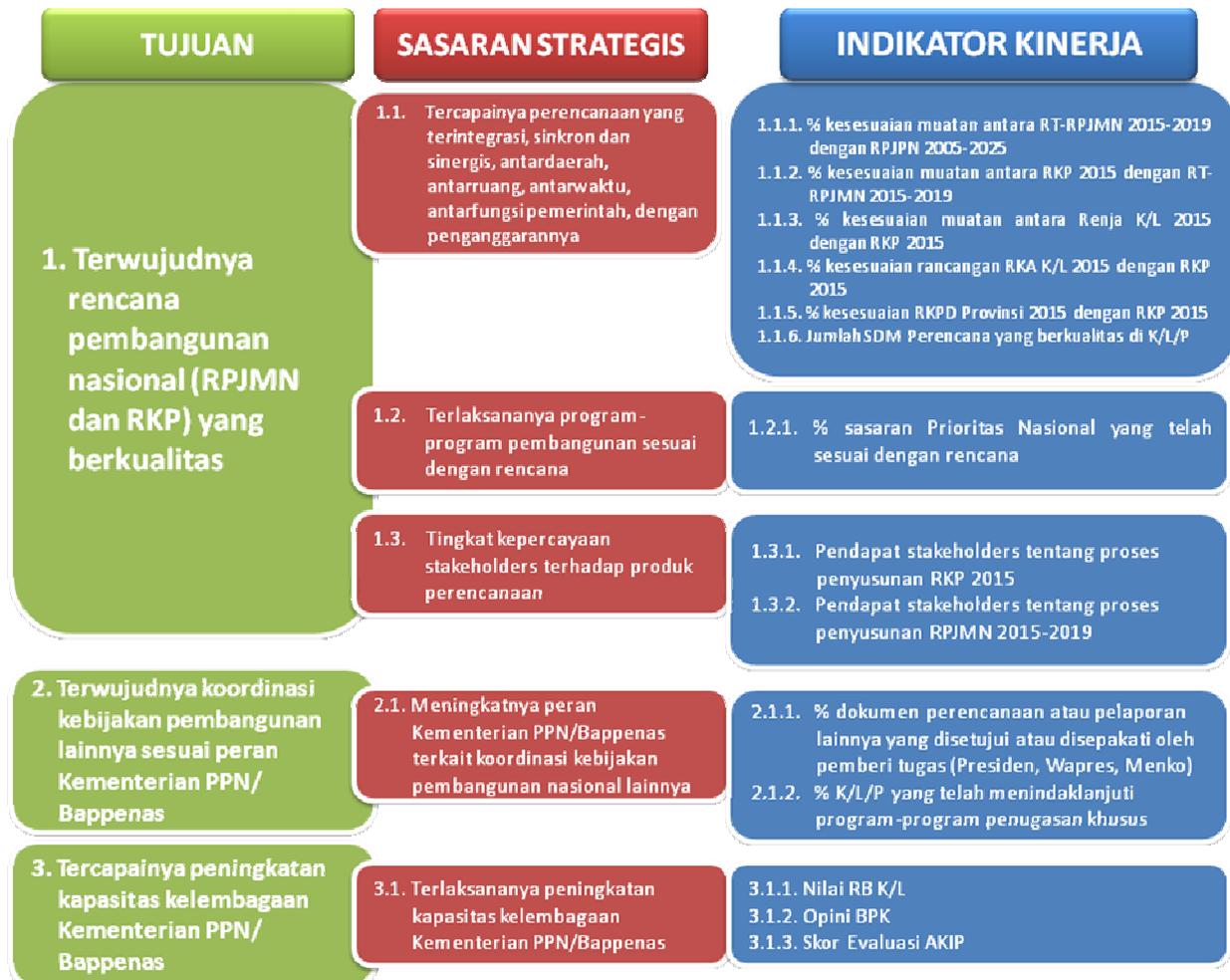
Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 3 (tiga) misi sesuai dengan peran-peran Kementerian PPN/Bappenas, adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan, dan menetapkan kebijakan perencanaan, penganggaran, regulasi, dan kelembagaan dalam pembangunan nasional
2. Merumuskan, menetapkan, menyeleraskan rencana pembangunan nasional dan prioritas pembangunan nasional (antar pusat dan daerah).
3. Melakukan sinkronisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga dengan strategi dan prioritas pembangunan nasional.
4. Melakukan pengendalian pelaksanaan pembangunan nasional.
5. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM perencana pusat dan daerah.

## B. TUJUAN DAN SASARAN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Kementerian PPN/Bappenas dijabarkan ke dalam tujuan, sasaran dan indikator yang ingin dicapai sebagaimana berikut:

### TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR TAHUN 2015 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL



Berdasarkan tujuan dan sasaran tersebut, maka ditetapkan target indikator kinerja (ukuran keberhasilan) yang akan dicapai melalui pelaksanaan program di Kementerian PPN/Bappenas pada tahun anggaran 2015 adalah sebagai berikut:

**TABEL 1**  
**PERJANJIAN KINERJA**  
**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN**  
**PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2015**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tercapainya perencanaan yang terintegrasi, sinkron dan sinergis antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah dengan penganggarannya	1. % kesesuaian muatan antara RKP 2016 dengan RPJMN 2015-2019	100%
		2. % kesesuaian muatan antara Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga (Renja K/L) 2016 dengan RKP 2016	90%
		3. % kesesuaian rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA K/L) 2016 dengan RKP 2016	85%
		4. % kesesuaian RKP Provinsi 2015 dengan RKP 2015	50%
		5. Jumlah SDM perencana berkualitas di K/L/P tahun 2015	2.292 orang
2	Terlaksananya peningkatan kapasitas kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas	% Sasaran Prioritas Nasional yang telah sesuai dengan rencana	90%
3	Tingkat kepercayaan stakeholders terhadap produk perencanaan	Pendapat stakeholders tentang proses penyusunan RKP 2016	Baik
4	Meningkatnya peran Kementerian PPN/Bappenas terkait koordinasi kebijakan pembangunan nasional lainnya.	1. % dokumen perencanaan atau pelaporan lainnya yang disetujui atau disepakati oleh pemberi tugas (Presiden, Wapres, Menko)	95%
		2. % K/L/P yang telah menindaklanjuti program-program penugasan khusus	100%
5	Terlaksananya peningkatan kapasitas kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas	Nilai RB K/L	90
		Opini BPK	WTP
		Skor Evaluasi AKIP	A

### C. STRUKTUR PROGRAM DAN PENGELOLAAN ANGGARAN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

#### 1. Struktur Program Kementerian PPN/Bappenas

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga perencanaan pembangunan nasional, Kementerian PPN/Bappenas menetapkan program-programnya sesuai RPJMN periode 2015-2019, yaitu program utama (teknis) dan program pendukung (generik), sebagai berikut:

a. Program Teknis

Program Perencanaan Pembangunan Nasional.

Program ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas utama Kementerian PPN/Bappenas dalam proses perencanaan, pemantauan, evaluasi, kajian dan koordinasi kebijakan pembangunan.

b. Program Generik

- 1) Program Generik 1: Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya.
- 2) Program Generik 2: Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- 3) Program Generik 3: Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur.

Dari berbagai program tersebut telah dijabarkan ke dalam berbagai kegiatan baik yang mendukung tugas-tugas utama maupun tugas pendukung dalam melaksanakan kewenangan Kementerian PPN/Bappenas.

## **2. Struktur Pengelolaan Anggaran Kementerian PPN/Bappenas**

Struktur pengelolaan anggaran di Kementerian PPN/Bappenas dilaksanakan oleh 35 (tiga puluh lima) Satuan Kerja (Satker), yaitu 1 Satker Utama pada tingkat Sekretaris Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Sesmen PPN/Sestama Bappenas), 1 Satker Pengelolaan Hibah *Millenium Challenge Corporation* (MCC) dan 33 Satker pelaksanaan dana dekonsentrasi di setiap provinsi. Satuan Kerja utama Setmen PPN/Settama Bappenas tersebut merupakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), yang dibantu oleh satu bendaharawan pengeluaran anggaran dan satu Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), serta beberapa orang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), baik PPK Program maupun PPK yang berada di setiap Unit Kerja Eselon I (UKE I) atau Kedeputan. Selain itu, pada setiap PPK dibantu oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dan Pejabat Pengadaan.

Susunan pengelola anggaran di Kementerian PPN/Bappenas tahun 2015 telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP.49/M.PPN/HK/03/2015 tentang perubahan keempat atas Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.103/M.PPN/HK/12/2013 Tentang Pengangkatan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (SPM), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Satuan Kerja (BPA SATKER) Kementerian PPN/Bappenas.

Dalam proses pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran, pengelola anggaran dan unit kerja pelaksana kegiatan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012, tentang Pedoman Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran di Kementerian PPN/Bappenas serta Petunjuk Pelaksanaan No. 2/Juklak/Sesmen/03/2014.

Dengan struktur pengelolaan anggaran tersebut diharapkan pelaksanaan program/kegiatan, pemantauan, dan pelaporan realisasi penyerapan anggaran akan menjadi suatu sinergi yang positif sehingga ada sinkronisasi antar struktur program dan kegiatan dengan struktur organisasinya.

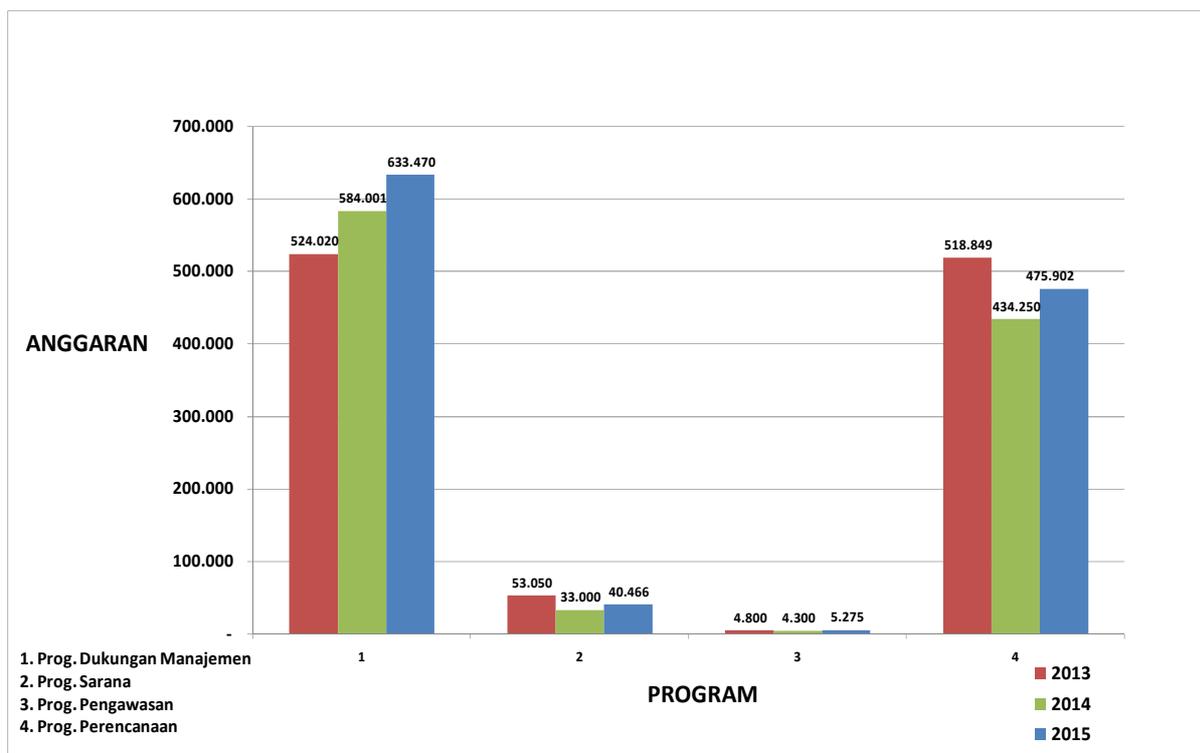
Seperti telah dijelaskan bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai lembaga perencanaan pembangunan nasional, alokasi anggaran Kementerian PPN/Bappenas tahun 2014 terdiri dari 4 (empat) program, yaitu:

- 1) Program Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dikelola oleh 12 (dua belas) PPK Kedeputian di lingkungan UKE I (Kedeputian), dan oleh 33 Satker di 33 provinsi.
- 2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya, yang dikelola oleh 4 (empat) PPK di Sekretariat Menteri PPN/Sekretariat Utama Bappenas (Setmen PPN/Settama Bappenas).
- 3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bappenas, yang dikelola oleh 1 (satu) PPK di Setmen PPN/Settama Bappenas.
- 4) Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur, yang dikelola oleh 1 (satu) orang PPK di Inspektorat Utama.

#### **D. ALOKASI ANGGARAN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN 2015**

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas, pada tahun anggaran 2015 Kementerian PPN/Bappenas mendapat alokasi dana sebesar Rp. 1.155.112.861.000,- yang terdiri dana rupiah murni (RM) sebesar Rp. 660.164.354.000,-, pinjaman luar negeri (PLN) sebesar Rp. 269.414.007.000,- dan hibah luar negeri (HLN) sebesar Rp. 225.534.500.000,-. Berikut pada Gambar 1 terlihat perbandingan alokasi dana tahun 2013-2015.

**GAMBAR 1**  
**ALOKASI DANA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS 2013-2015**



Sumber : Pagu DIPA Bappenas Tahun 2015

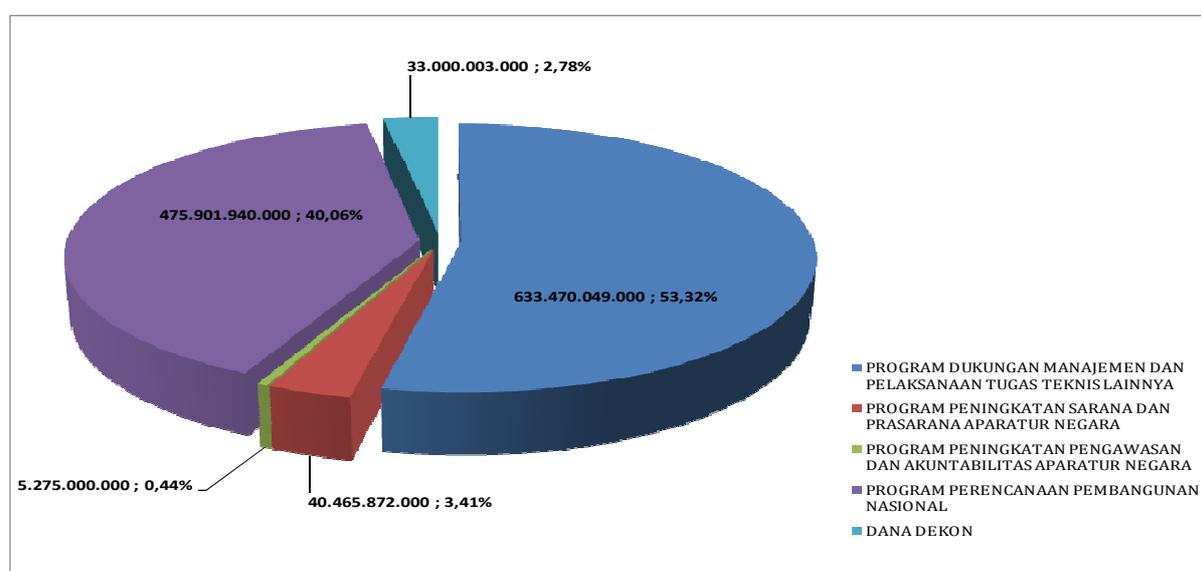
Anggaran Kementerian PPN/Bappenas dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan utama yang mendukung tercapainya sasaran strategis dan penetapan kinerja tahun 2015, yang terdiri dari 2 Satker di Kementerian PPN/Bappenas yang dikelola oleh 18 (delapan belas) PPK yang tersebar di masing-masing program, dan 33 Satker di 33 provinsi. Rincian alokasi anggaran Kementerian PPN/Bappenas tahun anggaran 2015 menurut program terdapat pada Tabel 2 dan porsi anggaran masing-masing program dapat dilihat pada Gambar 2.

**TABEL 2**  
**ALOKASI ANGGARAN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS**  
**TAHUN ANGGARAN 2015**

PROGRAM	PAGU ANGGARAN				TOTAL
	RM	PHLN		JUMLAH	
		PLN	HLN		
<b>SATKER 017312</b>	<b>647.164.354.000</b>	<b>269.414.007.000</b>	<b>15.534.500.000</b>	<b>284.948.507.000</b>	<b>932.112.861.000</b>
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	393.397.042.000	240.073.007.000	-	240.073.007.000	633.470.049.000
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappenas	40.465.872.000	-	-	-	40.465.872.000
Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur	5.275.000.000	-	-	-	5.275.000.000
Perencanaan Pembangunan Nasional	208.026.440.000	29.341.000.000	15.534.500.000	44.875.500.000	252.901.940.000
<b>SATKER 966009</b>	<b>13.000.000.000</b>	<b>-</b>	<b>210.000.000.000</b>	<b>210.000.000.000</b>	<b>223.000.000.000</b>
PPK Sekretariat Persiapan dan Pengembangan MCC (Satker 966009)	13.000.000.000	-	210.000.000.000	210.000.000.000	223.000.000.000
<b>JUMLAH</b>	<b>660.164.354.000</b>	<b>269.414.007.000</b>	<b>225.534.500.000</b>	<b>494.948.507.000</b>	<b>1.155.112.861.000</b>

Sumber : Pagu DIPA Bappenas Tahun 2015

**GAMBAR 2**  
**PROPORSI ALOKASI ANGGARAN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS**  
**TAHUN ANGGARAN 2015**



Dari Tabel 3 dan Gambar 2 tersebut dapat diketahui bahwa Program Perencanaan Pembangunan Nasional (termasuk dana yang dikelola oleh Pengelola Hibah MCC dan satker pengelola dana dekonsentrasi di seluruh provinsi) merupakan program yang mempunyai alokasi dana terbesar diantara program-program yang lain, kemudian disusul Program Dukungan Manajemen dan Pelaksana Tugas Teknis Lainnya yang mengelola gaji, tunjangan serta kegiatan strategis yang melibatkan hampir semua unit kerja eselon I dan II.

Pada tahun 2015, khusus untuk dana PHLN di Kementerian PPN/Bappenas terdapat 4 (empat) PLN dan 15 (lima belas) HLN, dengan nilai total sebesar Rp. 522.316.873.600,- (termasuk dana rupiah pendamping untuk PHRDP III dan PHRDP IV), sebagaimana terdapat pada Tabel 3 berikut:

**TABEL 3**  
**ALOKASI ANGGARAN PHLN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS**  
**TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	PROGRAM	PHLN		
		PLN	HLN	JUMLAH
	<b>DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA</b>	<b>240.073.007.000</b>	-	<b>240.073.007.000</b>
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PPN/Bappenas IV	240.073.007.000	-	240.073.007.000
a	Pusbindiklatren	240.073.007.000	-	240.073.007.000
	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL</b>	<b>29.341.000.000</b>	<b>225.534.500.000</b>	<b>254.875.500.000</b>
2	PPK Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan	-	1.434.500.000	1.434.500.000
a	Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat	-	1.434.500.000	1.434.500.000
3	PPK Deputi Bidang Sarana dan Prasarana	11.285.000.000	14.100.000.000	25.385.000.000
a	Direktorat Transportasi	11.285.000.000	14.100.000.000	25.385.000.000
4	PPK Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah	4.070.000.000	-	4.070.000.000
a	Direktorat Pengembangan Wilayah	4.070.000.000	-	4.070.000.000
5	PPK Program Sumber Daya Air Terpadu	9.900.000.000	-	9.900.000.000
6	PPK Sekretariat <i>Infrastructure Reform Sector Development Program</i>	4.086.000.000	-	4.086.000.000
7	PPK Sekretariat Persiapan Dan Pengembangan MCC (Satker 966009)	-	210.000.000.000	210.000.000.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>269.414.007.000</b>	<b>225.534.500.000</b>	<b>494.948.507.000</b>

Sumber : Pagu DIPA Bappenas Tahun 2015

### 1. Program Perencanaan Pembangunan Nasional

Sasaran Program Perencanaan Pembangunan Nasional adalah untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas utama Kementerian PPN/Bappenas dalam proses perencanaan, pemantauan, evaluasi, kajian dan koordinasi kebijakan pembangunan. Untuk mendukung pencapaian sasaran program tersebut, pada tahun anggaran 2015

program ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 475.901.940.000,- yang terdiri dari dana RM sebesar Rp. 221.026.440.000,- dan dana PHLN sebesar Rp. 254.875.500.000,-.

Alokasi anggaran Program Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan antara lain:

- 1) Penyusunan rencana pembangunan nasional dan pendanaan/penganggarnya, baik antarwaktu, sektor, wilayah maupun antartingkat/fungsi pemerintahan.
- 2) Pemantauan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan nasional.
- 3) Evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional, dan kajian serta evaluasi kebijakan pembangunan sebagai masukan bagi proses perencanaan berikutnya dan atau perumusan kebijakan pembangunan.
- 4) Koordinasi dalam melaksanakan perencanaan pembangunan nasional.

Khusus untuk penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah di daerah bertujuan untuk (1) memperkuat koordinasi perencanaan pusat dan daerah dalam rangka pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional dan (2) memperkuat koordinasi perencanaan prioritas pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam rangka peningkatan kualitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Nasional.

Pengelolaan anggaran Program Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut terbagi menjadi 3 Satker yang terdiri dari:

- 1) Satker 017312 yang dikelola oleh 11 (sebelas) PPK yang berada di UKE I Kedepatian (sebagaimana terdapat pada Tabel 4).
- 2) Satker 966009 yang dikelola oleh 1 (satu) PPK Pengelola Hibah MCC (sebagaimana terdapat pada Tabel 5).
- 3) Satker Dana Dekosentrasi (33 Satker) di 33 provinsi (sebagaimana terdapat pada Tabel 6).

**TABEL 4**  
**ALOKASI ANGGARAN PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**  
**MENURUT PPK TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN				TOTAL
		RM	PHLN		JUMLAH	
			PLN	HLN		
	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL</b>	<b>221.026.440.000</b>	<b>29.341.000.000</b>	<b>225.534.500.000</b>	<b>254.875.500.000</b>	<b>475.901.940.000</b>
1	PPK Deputy Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan	18.577.760.000	-	1.434.500.000	1.434.500.000	20.012.260.000
2	PPK Deputy Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan	14.040.000.000	-	-	-	14.040.000.000
3	PPK Deputy Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM	19.500.000.000	-	-	-	19.500.000.000
4	PPK Deputy Bidang Ekonomi	13.840.000.000	-	-	-	13.840.000.000
5	PPK Deputy Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	34.532.840.000	-	-	-	34.532.840.000
6	PPK Deputy Bidang Sarana dan Prasarana	23.616.860.000	11.285.000.000	14.100.000.000	25.385.000.000	49.001.860.000
7	PPK Deputy Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah	24.880.000.000	4.070.000.000	-	4.070.000.000	28.950.000.000
8	PPK Deputy Bidang Pendanaan Pembangunan	15.410.000.000	-	-	-	15.410.000.000
9	PPK Deputy Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan	14.690.000.000	-	-	-	14.690.000.000
10	PPK Program Sumber Daya Air Terpadu	5.724.000.000	9.900.000.000	-	9.900.000.000	15.624.000.000
11	PPK Sekretariat <i>Infrastructure Reform Sector Development Program</i>	23.214.980.000	4.086.000.000	-	4.086.000.000	27.300.980.000
13	PPK Sekretariat Persiapan Dan Pengembangan MCC (Satker 966009)	13.000.000.000	-	210.000.000.000	210.000.000.000	223.000.000.000

Sumber : Pagu DIPA Bappenas Tahun 2015

**TABEL 5**  
**ALOKASI DANA DEKONSENTRASI KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS**  
**TAHUN 2015**

No	KODE SATKER	NAMA SATKER	ALOKASI (Rp)
1	10025	DKI Jakarta	799.291.000
2	20060	Jawa Barat	838.291.000
3	30060	Jawa Tengah	915.691.000
4	40069	DI Yogyakarta	920.491.000
5	50060	Jawa Timur	943.291.000
6	60004	Aceh	1.045.291.000
7	70060	Sumatera Utara	1.006.891.000
8	80019	Sumatera Barat	958.891.000
9	90020	Riau	962.491.000
10	100086	Jambi	931.291.000
11	110060	Sumatera Selatan	920.491.000
12	120022	Lampung	882.091.000
13	130019	Kalimantan Barat	949.291.000
14	140018	Kalimantan Tengah	960.691.000
15	150060	Kalimantan Selatan	961.291.000
16	160019	Kalimantan Timur	1.006.291.000
17	170021	Sulawesi Utara	1.079.491.000
18	180060	Sulawesi Tengah	1.080.091.000
19	190060	Sulawesi Selatan	1.008.091.000
20	200019	Sulawesi Tenggara	1.027.891.000
21	210019	Maluku	1.190.491.000
22	220060	Bali	976.291.000
23	230020	Nusa Tenggara Barat	974.491.000
24	240026	Nusa Tenggara Timur	1.078.291.000
25	250060	Papua	1.252.891.000
26	260070	Bengkulu	940.291.000
27	280016	Maluku Utara	1.167.091.000
28	290009	Banten	823.291.000
29	300092	Bangka Belitung	913.291.000
30	310060	Gorontalo	1.063.891.000
31	320099	Kepulauan Riau	955.291.000
32	330096	Papua Barat	1.400.491.000
33	340030	Sulawesi Barat	1.066.291.000
<b>JUMLAH</b>			<b>33.000.003.000</b>

Sumber : Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 2 tahun 2015

Alokasi dana dekosentrasi tahun 2015 sebesar Rp. 33.000.003.000,- dengan sasaran penyelenggaraan dekonsentrasi penguatan sinergi pusat dan daerah di 33 provinsi.

## **2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya**

Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya adalah untuk meningkatkan efektifitas penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), serta terselenggaranya koordinasi perencanaan pembangunan. Untuk mendukung pencapaian sasaran program tersebut, pada tahun 2015 program ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 633.470.049.000,-. Alokasi ini terdiri dari dana rupiah murni (RM) sebesar Rp. 393.397.042.000,- dan dana PHLN sebesar Rp. 240.073.007.000,- yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan antara lain:

- 1) Peningkatan kapasitas instansi/unit perencanaan di pusat dan di daerah.
- 2) Penyempurnaan ketatalaksanaan.
- 3) Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur di Kementerian PPN/Bappenas dan aparatur perencana di instansi tingkat pusat dan daerah.
- 4) Peningkatan kualitas kehumasan dalam rangka membangun citra positif lembaga (*brand image building*).
- 5) Peningkatan kualitas sistem data dan informasi perencanaan pembangunan.
- 6) Pelaksanaan kegiatan pendukung lainnya.
- 7) Peningkatan intensitas kerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi profesi di pusat dan daerah.

Anggaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dikelola oleh 4 (empat) PPK di Setmen PPN/Settama Bappenas dan dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pada lingkup masing-masing UKE II. Secara rinci alokasi anggaran tahun 2015 pada masing-masing PPK Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (PPK DM) dapat dilihat pada Tabel 6.

**TABEL 6**  
**ALOKASI ANGGARAN**  
**PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA**  
**MENURUT PPK TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN				TOTAL
		RM	PHLN		JUMLAH	
			PLN	HLN		
	<b>DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA</b>	<b>393.397.042.000</b>	<b>240.073.007.000</b>	<b>-</b>	<b>240.073.007.000</b>	<b>633.470.049.000</b>
1	PPK DM I	86.519.558.000	-	-	-	86.519.558.000
2	PPK DM II	25.521.362.000	-	-	-	25.521.362.000
3	PPK DM III	226.599.129.000	-	-	-	226.599.129.000
4	PPK DM IV	54.756.993.000	240.073.007.000	-	240.073.007.000	294.830.000.000

Sumber : Pagu DIPA Bappenas Tahun 2015

### **3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappenas**

Sasaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappenas adalah meningkatnya akses sarana dan prasarana, penguasaan data/informasi dan teknologi informasi serta pemanfaatannya dalam rangka perumusan kebijakan pembangunan nasional. Untuk mendukung pencapaian sasaran program tersebut, program ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 40.465.872.000,-. Anggaran program ini dikelola oleh PPK Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bappenas yang dilaksanakan oleh Biro Umum. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

- 1) Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran.
- 2) Peningkatan Fasilitas Pelayanan Umum Dan Operasional.
- 3) Peningkatan Kualitas Sarana Dan Prasarana Pendukung Pelayanan.

### **4. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Bappenas**

Sasaran Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Bappenas adalah meningkatnya efektifitas sistem pengawasan dan audit serta sistem akuntabilitas kinerja dalam mewujudkan aparatur Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan bebas Kolusi Korupsi Nepotisme (KKN). Untuk mendukung pencapaian sasaran program tersebut, pada tahun 2015 program ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 5.275.000.000,-.

Anggaran program ini dikelola oleh PPK Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara yang berada di bawah pembinaan Inspektur Utama dan dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pada UKE I dan II di Inspektorat Utama.

#### **E. PERUBAHAN (REVISI) DIPA TAHUN 2014**

Sampai dengan Triwulan I tahun 2015, Kementerian PPN/Bappenas telah melakukan perubahan/revisi DIPA, diantaranya:

1. Revisi 1 tanggal 24 Februari 2015. Revisi yang dilakukan adalah perubahan akun belanja.
2. Revisi 1 (satker 966009) tanggal 3 Maret 2015. Revisi yang dilakukan adalah penambahan pagu hibah pada PPK Sekretariat Persiapan dan Pengembangan MCC menjadi Rp. 210.000.000.000,-.

### BAB III

## REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN 2015

Sebagaimana dijelaskan di atas alokasi anggaran Kementerian PPN/Bappenas tahun 2015 secara keseluruhan sebesar Rp. 1.155.112.861.000,- yang terdiri dana rupiah murni (RM) sebesar Rp. 660.164.354.000,-, pinjaman luar negeri (PLN) sebesar Rp. 269.414.007.000,- dan hibah luar negeri (HLN) sebesar Rp. 225.534.500.000,-. Realisasi penyerapan anggaran (diluar pelaksanaan dana dekonsentrasi) sampai dengan Maret 2015 sebesar Rp. 158.637.966.903,- (13,73%), yang terdiri dari dana RM sebesar Rp. 56.780.161.149,- (8,60%), dana PHLN sebesar Rp. 101.857.805.754,- (20,58%). Sedangkan alokasi anggaran kegiatan Dekonsentrasi tahun 2015 sebesar Rp. 33.000.003.000,-. Realisasi penyerapan anggaran sampai dengan triwulan I (akhir Maret) tahun 2015 yang dilaksanakan dari masing-masing program sebagaimana terdapat pada Tabel 7.

**TABEL 7**  
**REALISASI ANGGARAN SATKER KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS**  
**TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2015**

PROGRAM	REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN					
	RM	%	PHLN	%	TOTAL	%
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	38.954.405.067	9,90	15.669.425.152	-	54.623.830.219	8,62
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappenas	58.080.000	0,14	-	-	58.080.000	0,14
Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur	337.064.008	-	-	-	337.064.008	6,39
Perencanaan Pembangunan Nasional	17.430.612.074	7,89	86.188.380.602	-	103.618.992.676	21,77
<b>JUMLAH</b>	<b>56.780.161.149</b>	<b>8,60</b>	<b>101.857.805.754</b>	<b>20,58</b>	<b>158.637.966.903</b>	<b>13,73</b>

Sumber : Bagian Verifikasi Anggaran, Biro Umum

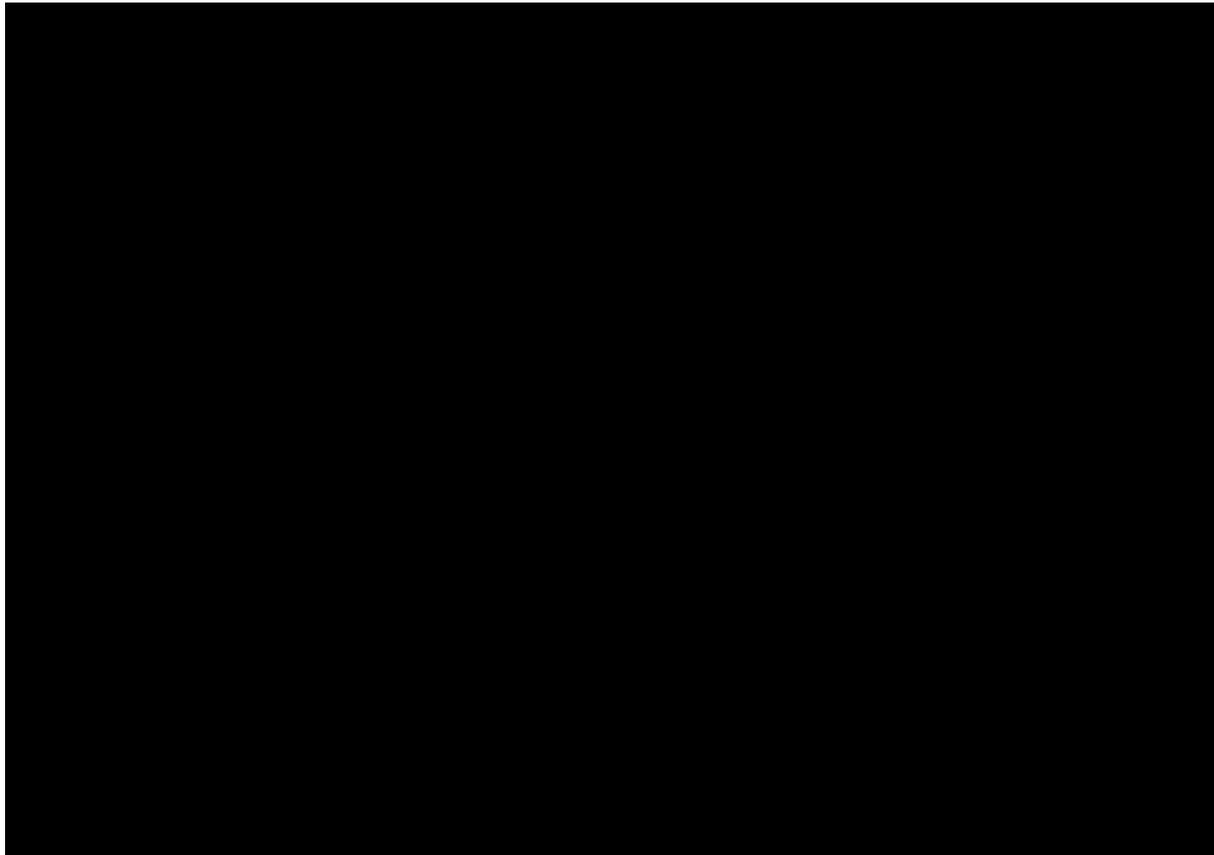
Secara rinci realisasi penyerapan anggaran tahun 2014 dari masing-masing program dijelaskan sebagai berikut:

#### **A. Program Perencanaan Pembangunan Nasional**

Alokasi anggaran Program Perencanaan Pembangunan Nasional untuk Satker Kementerian PPN/Bappenas sebesar Rp. 475.901.940.000,- yang terdiri dari dana RM sebesar Rp. 221.026.440.000,-, dana PHLN sebesar Rp. 254.875.500.000,-. Sampai dengan bulan Maret 2015, realisasi penyerapan anggaran mencapai Rp 103.618.992.676,- (21,77%).

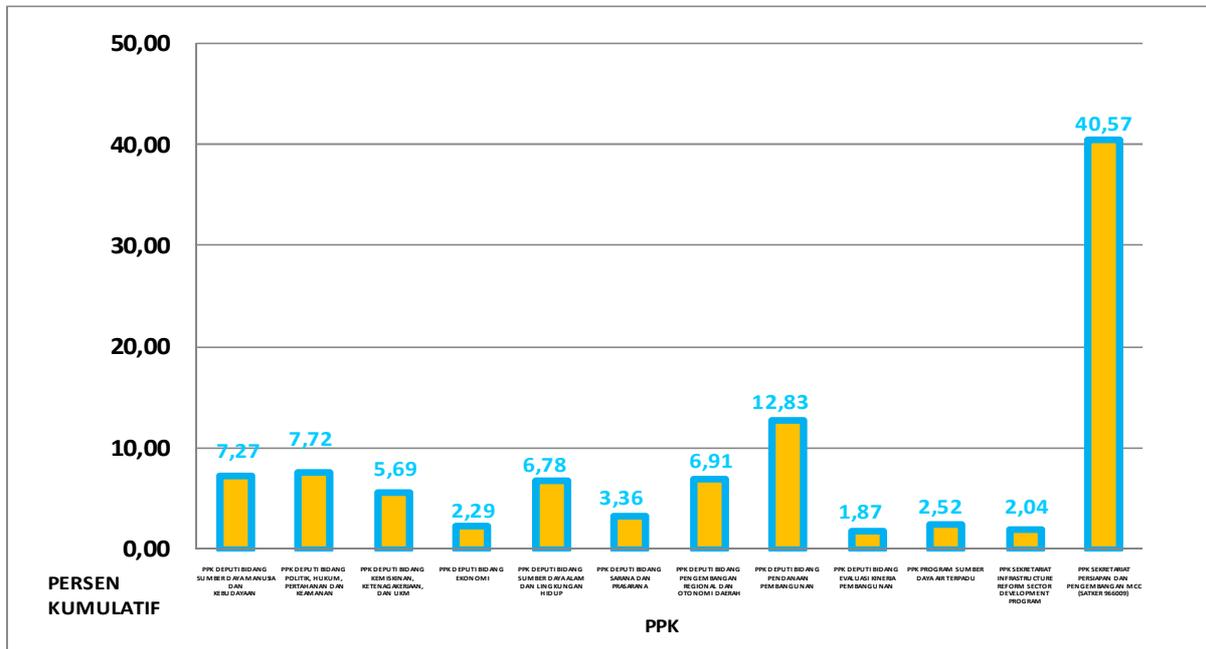
Anggaran program ini dikelola oleh 13 (tiga belas) PPK yang berada di UKE I dengan rincian realisasi penyerapan anggaran dan komposisinya sebagaimana terdapat pada Tabel 8 dan Gambar 3, serta penjelasannya sebagai berikut:

**TABEL 8**  
**REALISASI ANGGARAN PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN**  
**(NON DANA DEKONSENTRASI)**  
**TRIWULAN I TAHUN 2015**



Sumber : Bagian Verifikasi Anggaran, Biro Umum

**GAMBAR 3**  
**REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN**  
**PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**  
**MENURUT PPK TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2015**



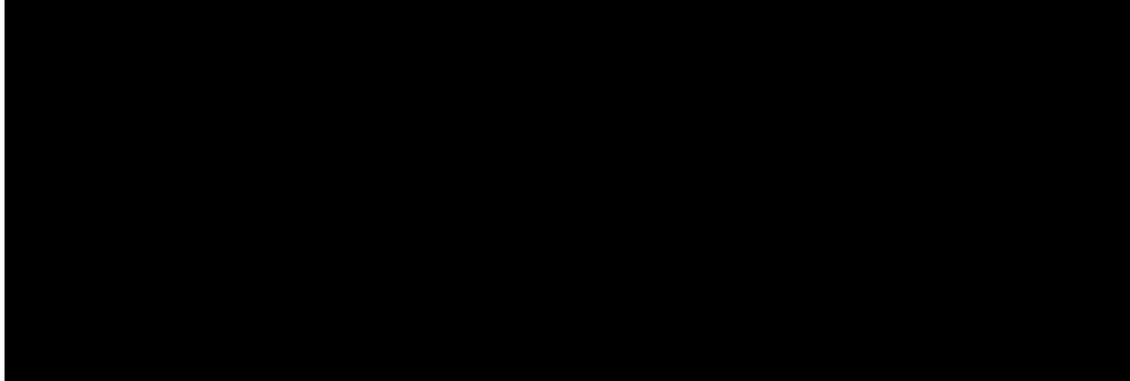
Sumber : Bagian Verifikasi Anggaran, Biro Umum

Realisasi penyerapan tertinggi PPK sampai dengan triwulan I tahun 2015 adalah PPK *Millennium Corporation Challenges (MCC)* yaitu 40,57%, disusul oleh PPK Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan 12,83%. Sedangkan penyerapan terendah adalah PPK Evaluasi Kinerja Pembangunan 1,87%. Berikut penjelasan lebih lanjut terkait realisasi penyerapan di masing-masing PPK.

### 1) PPK Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan

Alokasi anggaran PPK Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan pada sebesar Rp. 20.012.260.000,- terdiri dari dana RM sebesar Rp. 18.577.760.000,- dan dana HLN sebesar Rp. 1.434.500.000,-. Sampai dengan akhir bulan Maret, realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.455.459.200,- (7,27%) sebagaimana terdapat dalam Tabel 9.

**TABEL 9**  
**REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN**  
**PPK DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA DAN KEBUDAYAAN**  
**TRIWULAN I TAHUN 2015**



Sumber : Bagian Verifikasi Anggaran, Biro Umum

Dana HLN pada Kedeputian Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan dipergunakan untuk kegiatan Koordinasi Pengelolaan Hibah *Assistance For Rice Fortification For the Poor* (Hibah JFPR : *Assistance for Rice Fortification for the poor*) pada Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Hibah dari ADB ini akan berakhir pada akhir tahun ini. Permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya ketersediaan pagu pada DIPA untuk kontrak pelaksanaan studi efektivitas tahun 2015. Dana yang dibutuhkan sebesar Rp 1,9 M, namun ketersediaan pagu yang tercantum dalam DIPA Bappenas baru sebanyak Rp 966 juta. Penambahan anggaran tersebut telah diusulkan dari luncuran anggaran tahun 2014 dan usulan penambahan pagu anggaran tahun 2015. Untuk *study effectiveness* ini, pengajuan termin pembayaran baru dilakukan pada triwulan kedua karena pembayaran dilakukan berdasarkan *at cost*. Penarikan dana yang sudah dilaksanakan adalah untuk pembayaran konsultan.

Hibah langsung yang tidak masuk dalam DIPA adalah

- a. *Country Programme Action Plan (CPAP) 2011-2015 Government of Indonesia - UNICEF Programme of Cooperation*. Tujuan dari hibah ini adalah untuk mendukung Pemerintah dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Millenium (*MDGs*). Dengan nilai alokasi USD 1.518.014 untuk pelaksanaan tahun 2015, hibah ini sudah menarik dana Rp 1.317.195.000.
- b. *Support to the Acceleration of MDG Achievement in Indonesia (2013-2015)*. Hibah dari UNDP dengan nilai alokasi USD 900.000 telah dimulai pada 31 Januari 2013 dan akan berakhir pada 31 Desember 2015 bertujuan untuk

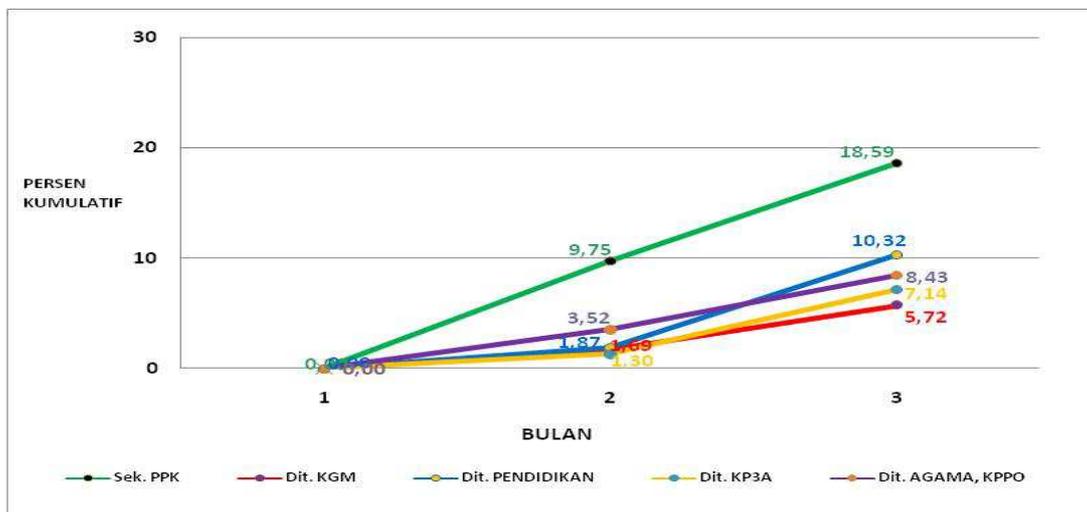
percepatan tujuan MDGs. Alokasi dana pada tahun 2015 adalah sebesar Rp 2.045.388.000 dan realisasi pada triwulan I adalah sebesar Rp 631.200.898.

Kedua hibah ini dilaksanakan oleh Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat.

c. *Country Programme Eight 2011-2015 (Programme of Cooperation between The GOI – UNFPA)*. Dengan tujuan untuk mendukung tercapainya tujuan RPJM, MDGs dan ICPD, pada akhir periode pelaksanaan, hibah ini dialokasikan sebesar USD 206.463 (Rp 2.461.055.000) untuk kegiatan Strategi Dinamika Kependudukan (PDS). Hibah ini dilaksanakan oleh Direktorat Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pada triwulan I, dana baru diserapkan 68% dari rencana sebesar Rp 537.000.000. Hal ini dikarenakan: 1) Kesulitan untuk mendapat tenaga konsultan untuk Kegiatan Pengembangan Modul Pelatihan terkait Hasil Proyeksi Penduduk 2010-2035 dan *Policy Dialog Roundtable*, 2) Tidak terlaksananya Pertemuan Tim Koordinasi dan Pertemuan Tim Pengarah Nasional.

Realisasi penyerapan dana setiap bulan di masing-masing unit kerja dapat terlihat pada Gambar 4.

**GAMBAR 4**  
**PERKEMBANGAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN**  
**PPK DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA DAN KEBUDAYAAN**  
**SAMPAI TRIWULAN I TAHUN 2015**

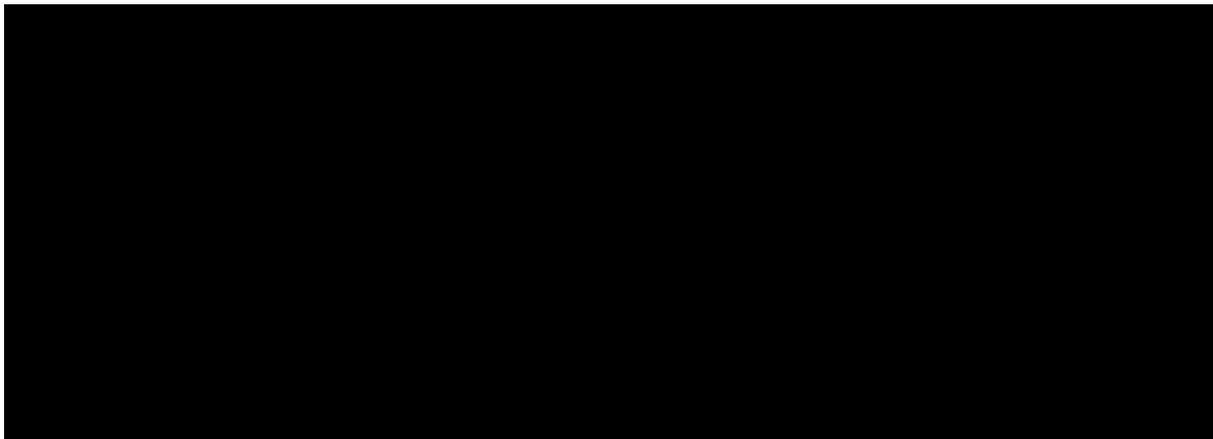


## 2) PPK Deputy Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan

Alokasi anggaran PPK Deputy Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) sebesar Rp. 14.040.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sampai dengan Maret 2015 sebesar Rp. 1.084.130.199,- (7,72%). Kegiatan yang dilaksanakan oleh UKE II di Kedeputian Bidang Polhukhankam

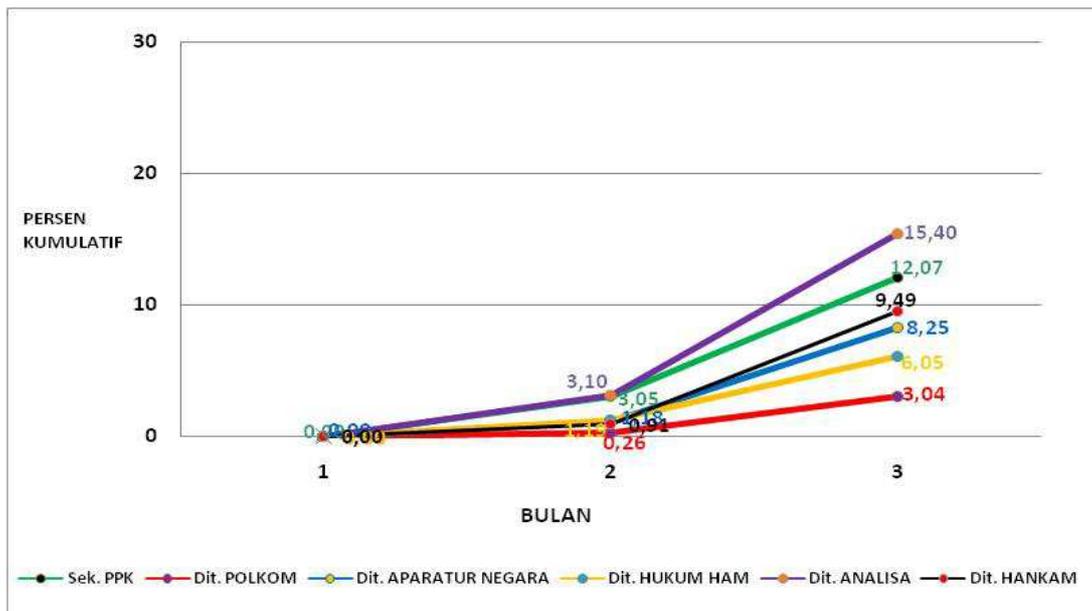
dalam rangka mendukung penyusunan rancangan kebijakan perencanaan pembangunan nasional bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan rencana pendanaan nasional di bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan. Secara rinci realisasi penyerapan anggaran setiap UKE II terdapat pada Tabel 10 dan perkembangan realisasi penyerapan dana setiap bulan dapat terlihat pada Gambar 5.

**TABEL 10**  
**REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN**  
**PPK DEPUTI BIDANG POLHUKHANKAM TRIWULAN I TAHUN 2015**



Sumber : Bagian Verifikasi Anggaran, Biro Umum

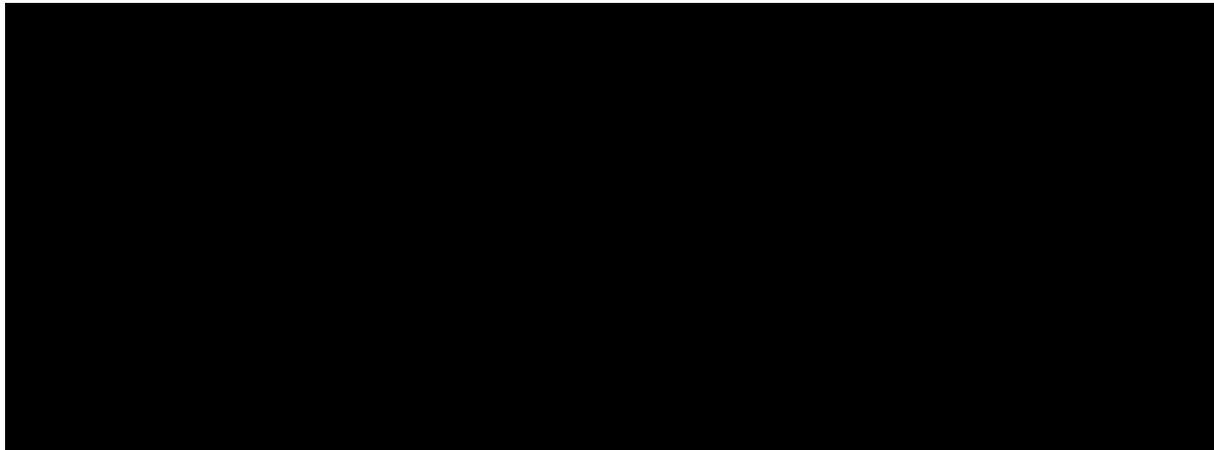
**GAMBAR 5**  
**PERKEMBANGAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN**  
**PPK DEPUTI BIDANG POLHUKHANKAM TRIWULAN I TAHUN 2015**



### 3) PPK Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil Menengah

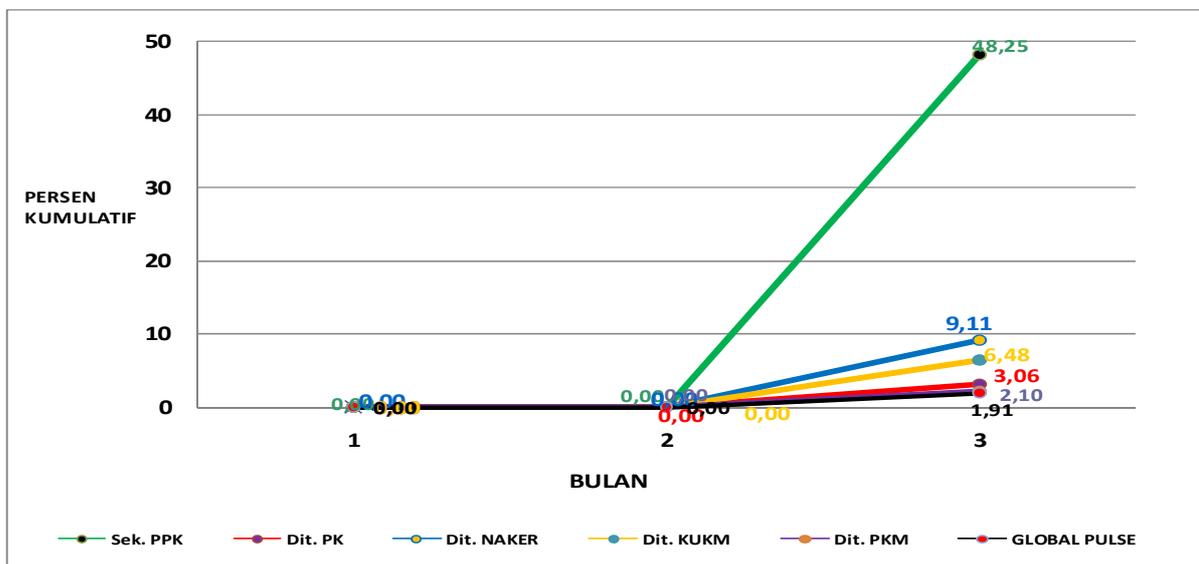
Alokasi anggaran PPK Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil Menengah sebesar Rp. 19.500.000.000,-, dengan realisasi penyerapan sampai dengan Maret 2015 sebesar Rp. 1.110.291.546,- (5,69%). Secara rinci realisasi penyerapan anggaran setiap UKE II terdapat pada Tabel 11 dan perkembangan realisasi penyerapan dana setiap bulan dapat terlihat pada Gambar 6.

**TABEL 11**  
**REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN**  
**PPK DEPUTI BIDANG KKUKM TIRWULAN I TAHUN 2015**



Sumber : Bagian Verifikasi Anggaran, Biro Umum

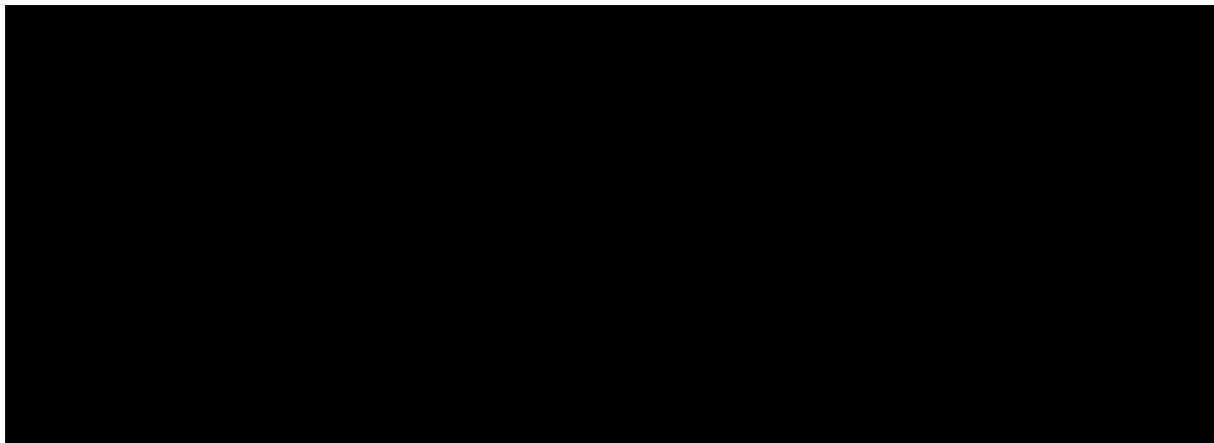
**GAMBAR 6**  
**PERKEMBANGAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN**  
**PPK DEPUTI BIDANG KKUKM TRIWULAN I TAHUN 2015**



#### 4) PPK Deputi Bidang Ekonomi

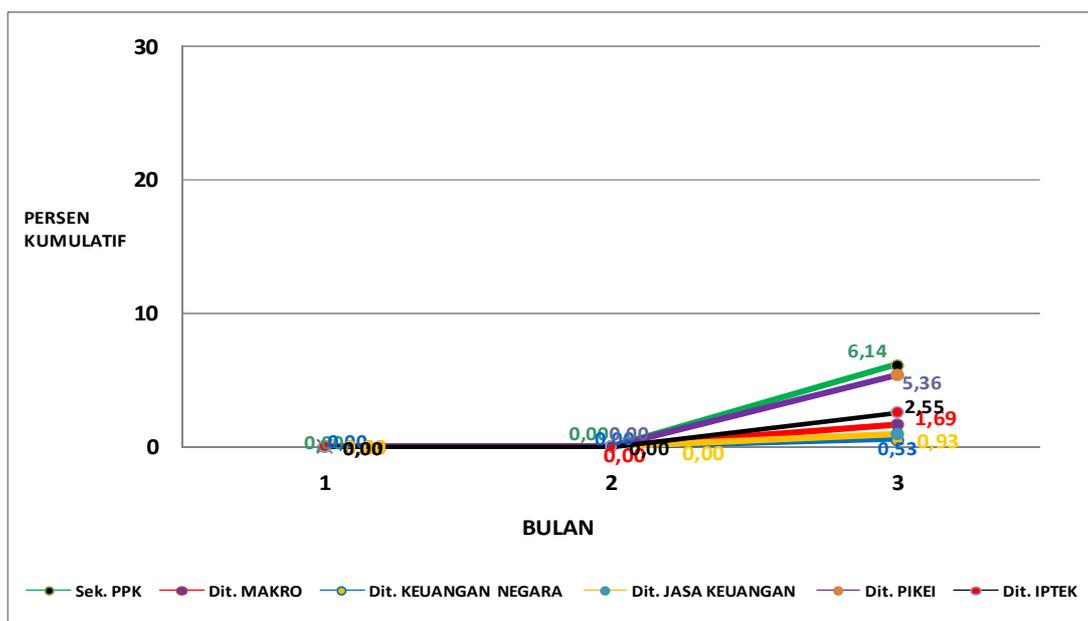
Alokasi anggaran PPK Deputi Bidang Ekonomi sebesar Rp. 13.840.000.000,- dengan realisasi penyerapan sampai dengan Maret 2015 sebesar Rp. 317.059.275,- (2,29%). Anggaran tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan pada UKE II termasuk untuk kegiatan koordinasi kedeputian sebagaimana terdapat pada Tabel 12 dan dengan perkembangan realisasi penyerapan anggaran setiap bulan terlihat pada Gambar 7.

**TABEL 12**  
**REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN**  
**PPK DEPUTI BIDANG EKONOMI TRIWULAN I TAHUN 2015**



Sumber : Bagian Verifikasi Anggaran, Biro Umum

**GAMBAR 7**  
**PERKEMBANGAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN**  
**PPK DEPUTI EKONOMI TRIWULAN I TAHUN 2015**



## 5) PPK Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

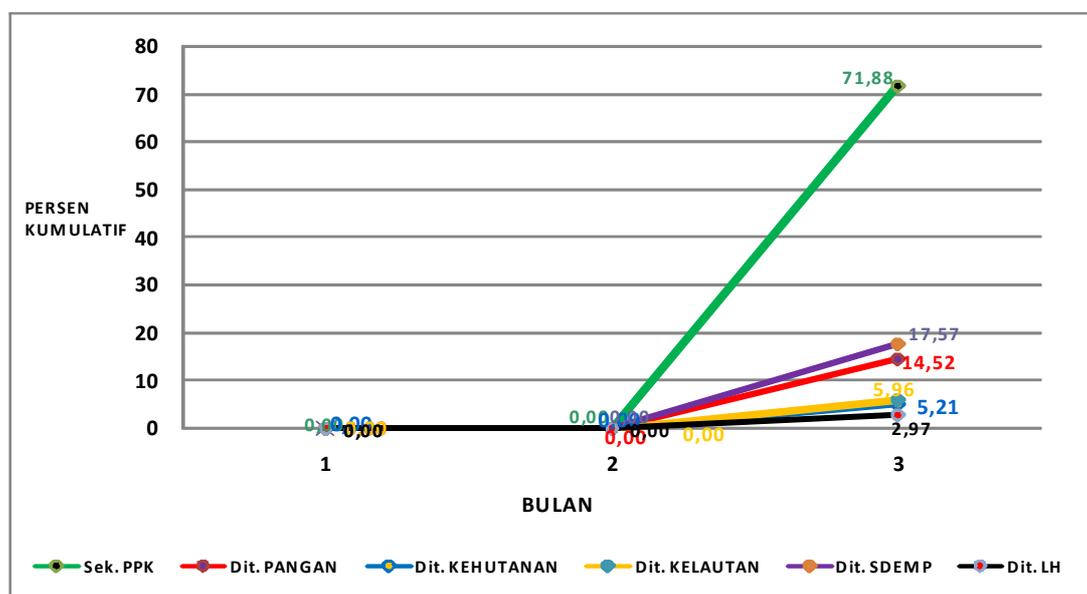
Alokasi anggaran PPK Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup pada sebesar Rp. 34.532.840.000,-. Realisasi penyerapan anggaran sampai dengan akhir Maret 2015 sebesar Rp. 2.340.193.354,- (6,78%). Anggaran tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan pada UKE II termasuk untuk kegiatan koordinasi kedeputian sebagaimana terdapat pada Tabel 13 dan perkembangan realisasi penyerapan dana setiap bulan di masing-masing UKE II terlihat pada Gambar 8.

**TABEL 13**  
**REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN**  
**PPK DEPUTI SDALH TRIWULAN I TAHUN 2015**

NO	PROGRAM	REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN									
		RM	%	PHLN				JUMLAH	%	TOTAL	%
				PLN	%	HLN	%				
5	PPK DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	2.340.193.354	6,78	-	-	-	-	-	-	2.340.193.354	6,78
	a Sekretariat PPK Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	217.682.983	71,88	-	-	-	-	-	-	217.682.983	71,88
	b Direktorat Pangan dan Pertanian	540.136.907	14,52	-	-	-	-	-	-	540.136.907	14,52
	c Direktorat Kehutanan & Konservasi Sumber Daya Air	163.486.400	5,21	-	-	-	-	-	-	163.486.400	5,21
	d Direktorat Kelautan dan Perikanan	297.988.900	5,96	-	-	-	-	-	-	297.988.900	5,96
	e Direktorat Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan	548.238.360	17,57	-	-	-	-	-	-	548.238.360	17,57
	f Direktorat Lingkungan Hidup	572.659.804	2,97	-	-	-	-	-	-	572.659.804	2,97

Sumber : Bagian Verifikasi Anggaran, Biro Umum

**GAMBAR 8**  
**PERKEMBANGAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN**  
**PPK DEPUTI SDALH TRIWULAN I TAHUN 2015**

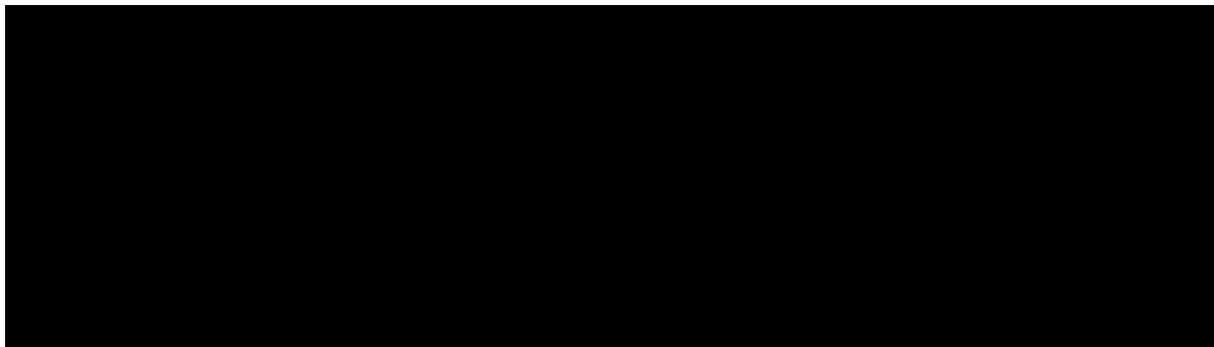


## 6) PPK Deputi Bidang Sarana dan Prasarana

Alokasi anggaran PPK Deputi Bidang Sarana dan Prasarana pada tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 49.001.860.000,- yang terdiri dari dana RM sebesar Rp. 23.616.860.000,- dan dana PHLN sebesar Rp. 25.385.000.000,-.

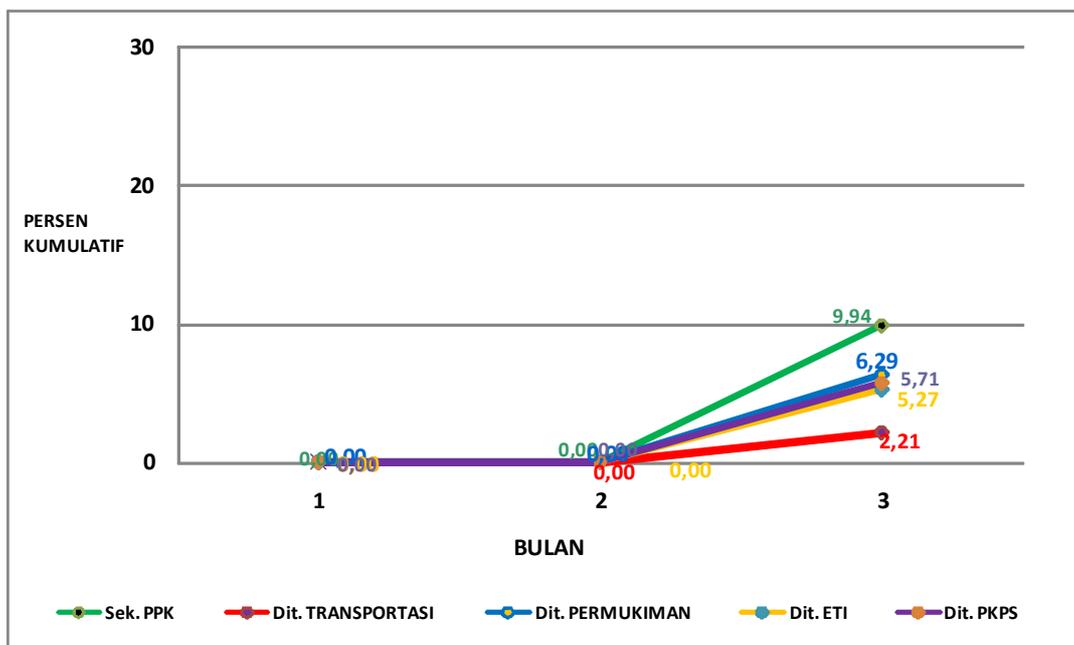
Secara rinci realisasi penyerapan anggaran setiap UKE II terdapat pada Tabel 14 dan perkembangan realisasi penyerapan dana setiap bulan dapat terlihat pada Gambar 9.

**TABEL 14**  
**REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN**  
**PPK DEPUTI BIDANG SARANA DAN PRASARANA TRIWULAN I TAHUN 2015**



Sumber : Bagian Verifikasi Anggaran, Biro Umum

**GAMBAR 9**  
**PERKEMBANGAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN**  
**PPK DEPUTI SARANA DAN PRASARANA TRIWULAN I TAHUN 2015**



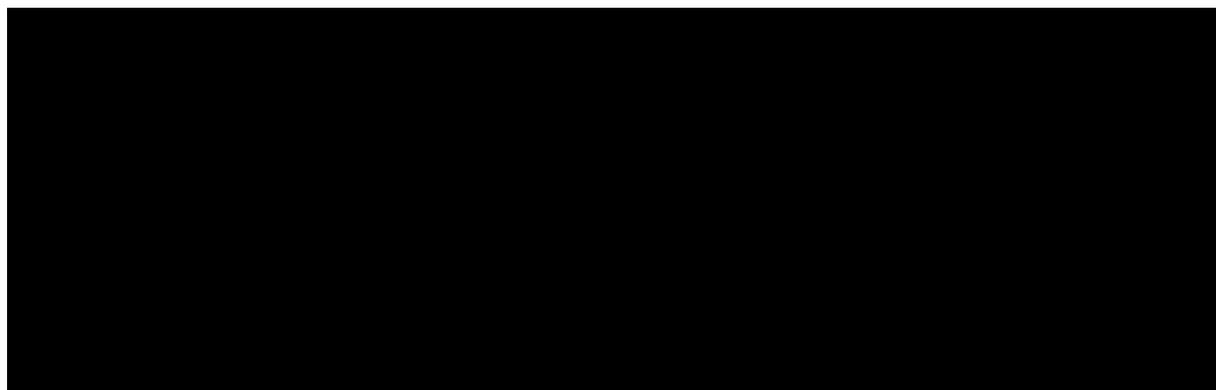
Hibah langsung yang dikelola oleh Direktorat Transportasi adalah :

- a. *Consulting Services for the Preparation of a Pre-Feasibility in Urban Mobility Denpasar Project* - BMZ ID 2099 15 356 – KfW. Hibah ini bertujuan untuk membantu Pemerintah Kota Denpasar dalam menyusun strategi 5 tahunan transportasi umum yang atraktif, aman dan terjangkau secara ekonomi di Kota Denpasar telah dimulai pada tanggal 25 November 2014 dan akan berakhir pada 1 Desember 2016. Dengan alokasi dana sebesar EUR 229,450 (Rp. 3.277.857.142,-), sampai triwulan I ini telah dilaksanakan pembahasan *inception report* dan tengah diproses pembayaran *advanced payment*.
- b. *Technical Assistance for The Surabaya Urban Transport Coridor Development Project* - TF 016825 – Bank Dunia. Dengan alokasi USD 1.250.000.000 (Rp. 15.625.000.000), hibah ini bertujuan untuk Penyusunan studi kelayakan untuk mendukung rencana investasi Pemerintah Kota Surabaya dalam pembangunan Kereta Api Cepat Perkotaan yang dirancang menggunakan skema pembiayaan PPP dan kemungkinan pinjaman dari *World Bank* yang akan menjadi pertimbangan Pemerintah Republik Indonesia. Pada triwulan I ini sedang dilaksanakan Persiapan pembahasan *inception report*.

#### **7) PPK Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah**

Alokasi anggaran PPK Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah tahun 2015 sebesar Rp. 28.950.000.000,- yang terdiri dari dana RM sebesar Rp. 24.880.000.000,- dan dana PHLN sebesar Rp. 4.070.000.000,-. Realisasi penyerapan anggaran sampai dengan akhir Desember 2014 ini mencapai Rp. 1.999.351.655,- (6,91%) sebagaimana terdapat pada Tabel 15.

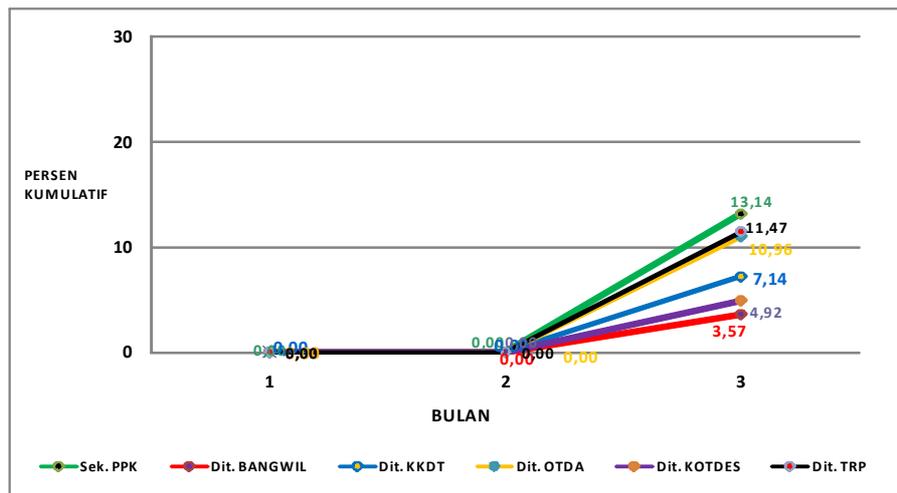
**TABEL 15**  
**REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN**  
**PPK DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN REGIONAL DAN OTONOMI DAERAH**  
**TRIWULAN I TAHUN 2015**



Sumber : Bagian Verifikasi Anggaran, Biro Umum

Perkembangan realisasi penyerapan dana setiap bulan di masing-masing unit kerja Kedeputusan Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah terlihat pada Gambar 10.

**GAMBAR 10**  
**PERKEMBANGAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN**  
**PPK DEPUTI PENGEMBANGAN REGIONAL DAN OTONOMI DAERAH**  
**TRIWULAN I TAHUN 2015**



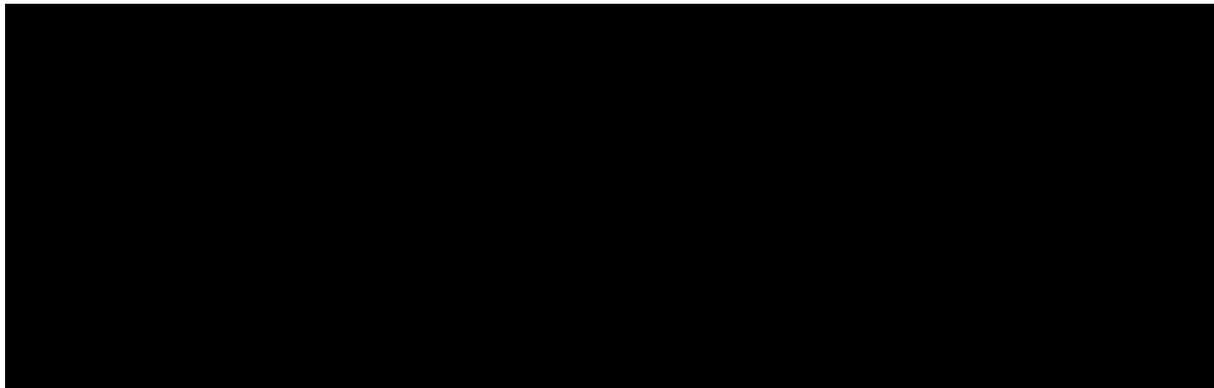
Pelaksanaan hibah *Rural Settlement Infrastructure and Kabupaten Strategic Area Development (RISE) II* yang dikelola oleh Direktorat Pengembangan Wilayah bertujuan untuk mempercepat pembangunan ekonomi masyarakat pedesaan dengan berbasis pada sumberdaya lokal untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah, pengentasan kemiskinan, memperbaiki pengelolaan pemerintah daerah di tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Desa, serta penguatan institusi lokal di tingkat Desa. Alokasi DIPA 2015 adalah sebesar Rp 4.070.000.000 dan direncanakan akan diserap pada semester 2 tahun 2015. Pada triwulan I ini paket konsultan masih dalam proses lelang. Surat untuk permintaan Persetujuan *Shortlist* dari tanggal 11 Februari 2015 dan sampai sekarang belum mendapat *concurrance*/Persetujuan dari JICA.

**8) PPK Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan**

Dalam rangka melaksanakan kegiatan di Kedeputusan Bidang Pendanaan Pembangunan dalam rangka mendukung penyusunan rancangan kebijakan perencanaan pembangunan nasional bidang pendanaan pembangunan (RKP 2015) dan rencana pendanaan nasional. Kedeputusan Bidang Pendanaan Pembangunan pada tahun anggaran 2015 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 15.410.000.000,-.

Realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.976.974.818,- (12,83%) sebagaimana terdapat pada Tabel 16.

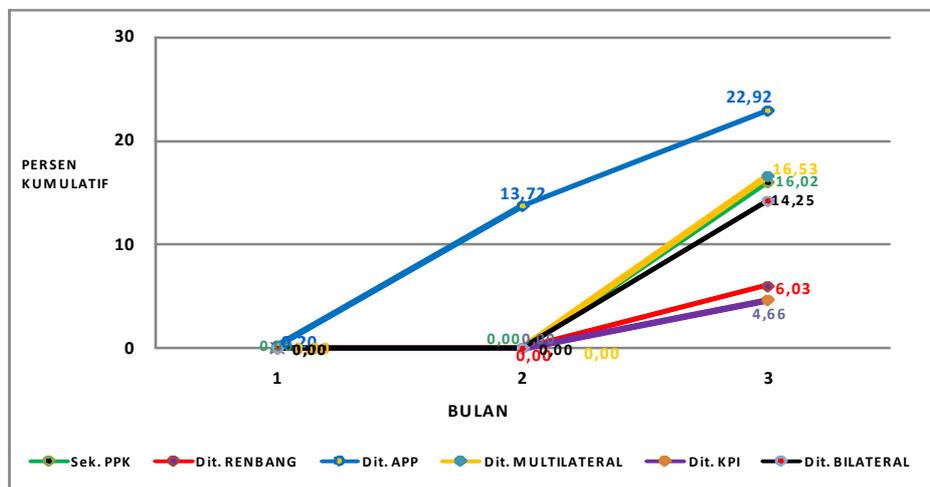
**TABEL 16**  
**REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN**  
**PPK DEPUTI BIDANG PENDANAAN PEMBANGUNAN TRIWULAN I TAHUN 2015**



Sumber : Bagian Verifikasi Anggaran, Biro Umum

Perkembangan realisasi penyerapan dana setiap bulan di masing-masing unit kerja Kedeputusan Bidang Pendanaan Pembangunan terlihat pada Gambar 11.

**GAMBAR 11**  
**PERKEMBANGAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN**  
**PPK DEPUTI PENDANAAN PEMBANGUNAN TRIWULAN I TAHUN 2015**

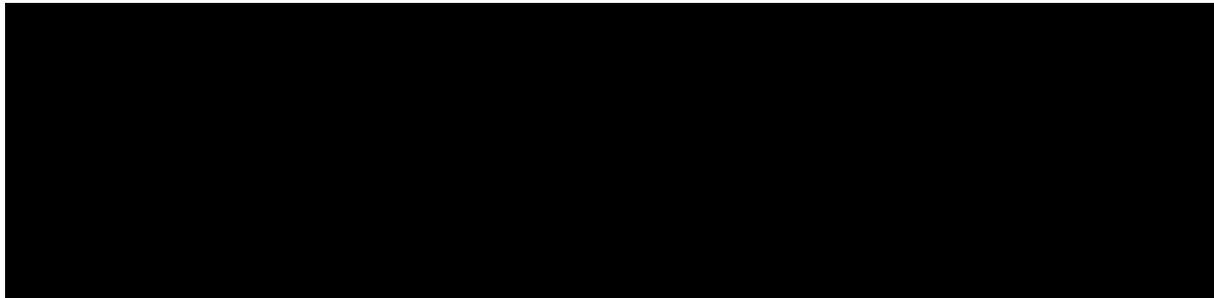


Pelaksanaan hibah *Strengthening Innovative Partnership for Development Cooperation (SIP-DC)* yang dikelola oleh Direktorat Kerjasama Pembangunan Internasional bertujuan untuk mendukung Kementerian PPN / Bappenas dan kapasitas kementerian terkait untuk membangun dan membina kemitraan global untuk kerjasama pembangunan. Pada triwulan I ini telah mampu menyerap dana Rp 525.057.047.

## 9) PPK Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan

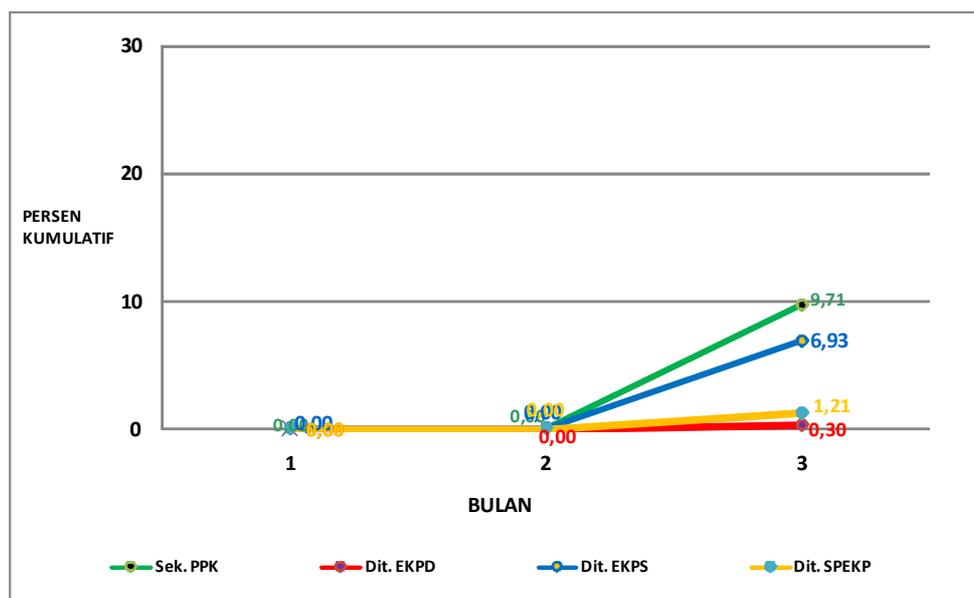
Alokasi anggaran PPK Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan sebesar Rp. 14.690.000.000,-, dengan realisasi penyerapan mencapai sebesar Rp. 275.407.600,-(1,87%). Anggaran tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan pada UKE II termasuk untuk kegiatan koordinasi ke deputian. Secara rinci realisasi penyerapan anggaran setiap UKE II terdapat pada Tabel 17 dan perkembangan realisasi penyerapan dana setiap bulan dapat terlihat pada Gambar 12.

**TABEL 17**  
**REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN**  
**PPK DEPUTI BIDANG EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN TRIWULAN I**  
**TAHUN 2015**



Sumber : Bagian Verifikasi Anggaran, Biro Umum

**GAMBAR 12**  
**PERKEMBANGAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN**  
**PPK DEPUTI EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN TRIWULAN I TAHUN 2015**



## 10) PPK Program Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu

Alokasi anggaran PPK Program Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu pada tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 15.624.000.000,- yang terdiri dari RM sebesar Rp. 5.724.000.000,- dan dana PLN sebesar Rp. 9.900.000.000,-, dengan realisasi penyerapan RM sampai dengan Maret 2015 sebesar Rp. 179.733.070,- (3,14%), sementara realisasi penyerapan dana PLN mencapai 2,15% atau sebesar Rp. 213.294.430,- Dana program ini dialokasikan untuk kegiatan pengairan dan irigasi di Direktorat Pengairan dan Irigasi, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana.

Progres pelaksanaan pinjaman dan hibah luar negeri adalah sebagai berikut:

- a. *Water Resources and Irrigation Sector Management Program Phase II (WISMP II)* – Bank Dunia (8027 – ID).

Dengan jumlah pinjaman sebesar USD 150.000.000 dan akan berakhir pada 30 November 2016, pinjaman ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan sumberdaya air di wilayah sungai dan irigasi serta meningkatkan produktivitas pertanian di lahan beririgasi. Alokasi tahun 2015 berjumlah Rp 2.995.209.001 dan telah menyerap Rp 73.908.661.

- b. *Urban Flood Control System Improvement in Selected Cities* - JICA (IP 551). Alokasi 2015 sebesar JPY 9.088.810 (Rp 886.159.000) dan direncanakan baru akan dilakukan penarikan pada triwulan 2.

- c. *Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program Project 1* – ADB (INO – 2500/INO-2501(SF)). Alokasi tahun 2015 adalah sebesar USD 793.033 (Rp 7.613.117.000) dan dana pendamping sebesar Rp 1.031.484.000. Pinjaman ini telah mengalami perpanjangan masa laku pinjaman sampai dengan 31 Mei 2016 atau mendapat perpanjangan 23 bulan. Pengelolaan Sumber Daya Air Secara Terpadu di Wilayah Sungai Citarum merupakan tujuan dari pinjaman ini. Alokasi tahun 2015 untuk kegiatan *Independent Monitoring & Evaluation* swakelola dialokasikan sebesar Rp 2.000.000.000

- d. *Dam Operational Improvement and Safety Project (DOISP)* – Bank Dunia (7669-IND). Pinjaman ini akan berakhir pada 01 Juli 2015 setelah mendapat perpanjangan masa laku dari 31 Desember 2013. Alokasi 2015 sebesar Rp 408.742.000 dan telah ditarik Rp 107.730.400 pada triwulan I ini yang diperuntukkan swakelola *Independent Monitoring & Evaluation*. Sedangkan dana pendamping sebesar Rp 128.224.000 telah ditarik Rp 26.932.600.

- e. *Decentralized Irrigation System Improvement Project in Eastern Region of Indonesia II (DISIMP II)* – JICA (IP 547). Alokasi 2015 mendapat pagu dana

sebesar Rp 1.750.000.000 yang digunakan untuk kegiatan *Independent Monitoring and Evaluation*.

- f. Consulting Service for Participatory Irrigation Rehabilitation and Improvement Management (PIRIMP) – JICA (IP 546). Alokasi 2015 mendapat pagu dana sebesar Rp 1.750.000.000 yang digunakan untuk kegiatan *Independent Monitoring and Evaluation*.

#### **11) PPK Sekretariat *Infrastructure Reform Sector Development Program***

Alokasi anggaran pada PPK Sekretariat *Infrastructure Reform Sector Development Program* sebesar Rp. 27.300.980.000,- yang terdiri dari dana RM sebesar Rp. 23.214.980.000,- dan dana PLN sebesar Rp. 4.086.000.000,- untuk melaksanakan kegiatan *Infrastructure Reform Sector Development (IRSDP)/ Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD)*. Realisasi penyerapan anggaran sampai dengan Maret 2015 sebesar Rp. 556.489.567,- (2,04%).

Kegiatan P2MPD bertujuan memberikan bantuan teknis untuk memfasilitasi penyiapan proyek infrastruktur dengan mengikutsertakan sektor swasta, yang dilaksanakan oleh Direktorat Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta dengan rincian kegiatan:

- a) Penyusunan Program dan Rencana Kerja Teknis/Program (IRSDP, Sekretariat WASAP, Koordinasi Perencanaan Infrastruktur, Sekretariat PPITA)
- b) Penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan
- c) Pembinaan Koordinasi dan Konsultasi Pengawasan
- d) Pengadaan Peralatan
- e) Monitoring dan Evaluasi

#### **12) PPK Program Pengelolaan Hibah MCC**

Pada tanggal 19 November 2011 Pemerintah Amerika Serikat diwakili Menteri Luar Negeri, Hillary Clinton dan Pemerintah Indonesia diwakili Menteri Keuangan, Agus Martowardjojo menandatangani *MCC-Compact Agreement (Perjanjian Hibah Program Compact)* selama 5 tahun dengan nilai USD 600 juta.

Tujuan dari *Program Compact* adalah mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia dengan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui tiga program yaitu: (1) Kemakmuran Hijau (*Green Prosperity*), (2) Kesehatan Gizi Berbasis Masyarakat untuk Mencegah Anak Pendek (*Community-based Health and Nutrition*), (3) Modernisasi Sistem Pengadaan (*Procurement Modernization*). *Program Compact* di Indonesia dimulai sejak ditandatanganinya *Implementation Letter* oleh Wakil

Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas dengan *VP-Department of Compact Operations* – MCC pada tanggal 2 April 2013 dan akan berakhir pada tanggal 1 April 2018.

Sesuai dengan PMK No. 124/PMK.05/2012 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah MCC bahwa pelaksanaan anggaran yang berasal dari Hibah MCC dialokasikan dalam DIPA Satker Pengelola Hibah MCC. Selain alokasi dari Hibah MCC, dalam DIPA Satker juga dialokasikan dana yang bersumber dari rupiah murni untuk operasional Satker dan penggantian pajak terkait hibah *Program Compact*.

Pelaksanaan anggaran HLN yang dialokasikan dalam DIPA tersebut menggunakan mekanisme Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) sedangkan untuk alokasi Rupiah Murni menggunakan mekanisme Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Alokasi anggaran PPK Pengelolaan Hibah MCC pada tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 223.000.000.000,-, terdiri dari dana RM sebesar Rp. 13.000.000.000,- dan dana HLN sebesar Rp. 210.000.000.000,-, dengan realisasi penyerapan dana RM sebesar Rp 4.607.310.318,- (35,44%), sementara realisasi penyerapan dana HLN mencapai 40,88%, atau sebesar Rp 85.855.213.172,-.

### 13) Satker Dana Dekonsentrasi Tahun 2015

Dari 33 provinsi pelaksana Dana Dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas tahun 2015, sampai dengan triwulan I, baru 10 satker provinsi yang telah melakukan penarikan dana, dengan total penyerapan dana sebesar Rp 1.162.025.333,-.

**TABEL 18**  
**REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN**  
**PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**  
**SATKER DEKOSENTRASI 2015**  
**TRIWULAN I TAHUN 2015**

NO	SATKER	PENYERAPAN			JUMLAH	%
		JAN	FEB	MARET		
1	080019 - Bappeda Provinsi Sumatera Barat	-	-	197.615.788	197.615.788	20,61
2	150060 - Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan	-	53.398.200	52.681.600	106.079.800	11,04
3	170021 - Bappeda Provinsi Sulawesi Utara	-	-	66.988.220	66.988.220	6,21
4	180060 - Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah	-	-	120.230.200	120.230.200	11,13
5	200019 - Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara	-	-	101.434.700	101.434.700	9,87
6	230020 - Bappeda Provinsi NTB	-	-	86.131.600	86.131.600	8,84
7	260070 - Bappeda Provinsi Bengkulu	-	-	145.760.000	145.760.000	15,50

NO	SATKER	PENYERAPAN				
		JAN	FEB	MARET	JUMLAH	%
8	280016 - Bappeda Provinsi Maluku Utara	-	81.253.200	87.688.300	168.941.500	14,48
9	310060 - Bappeda Provinsi Gorontalo	-	-	105.893.625	105.893.625	9,95
10	340030 - Bappeda Provinsi Sulawesi Barat	-	-	62.949.900	62.949.900	5,90
		-	<b>134.651.400</b>	<b>1.027.373.933</b>	<b>1.162.025.333</b>	

Sumber : <http://monev.anggaran.depkeu.go.id/2015>

Secara keseluruhan pelaksanaan dana dekonsentrasi tahun 2015 di seluruh provinsi berjalan dengan baik. Beberapa kendala dalam pelaksanaan yang dapat diinventarisasi dalam pelaksanaan dana dekonsentrasi secara keseluruhan antara lain:

1. Dana
  - a. Ketersediaan anggaran terbatas sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan 8 fokus kegiatan dekonsentrasi 2015
  - b. Anggaran dekonsentrasi kurang memadai sehingga belum semua kegiatan prioritas nasional dapat tertampung
  - c. Lamanya proses pencairan dana dekonsentrasi dan peruntukannya untuk beberapa kegiatan
  - d. Keterlambatan proses pencairan karena harus menunggu kelengkapan administrasi (SPJ) kegiatan sebelumnya
  - e. Dana dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas hanya digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang bersifat koordinasi, belum terakomodirnya belanja terkait Jasa Konsultan Pihak ke 3
2. SDM
  - a. Pergantian staf pengelola dana dekonsentrasi di beberapa satker
  - b. Terbatasnya staf pelaksana
  - c. Keterbatasan tenaga pelaksana dan data
3. Waktu
  - a. *Time line* setiap proyek tidak mungkin dicapai dan ada aturan yang berbeda dengan APBD Provinsi
  - b. Keterbatasan waktu penilaian pangripta kabupaten/kota
  - c. Waktu pelaksanaan kegiatan kadang-kadang bersamaan dengan kegiatan APBD
4. Koordinasi
  - a. Kurangnya koordinasi/sinergi antara pelaksana kegiatan di bidang Pelaksana dengan anggota satker dalam perencanaan dan pelaksanaan dekonsentrasi, sehingga mengakibatkan seringnya revisi POK

- b. Perlu adanya koordinasi yang lebih intensif antara bidanng perencanaan dalam melakukan kegiatan sesuai dengan DIPA
  - c. Sulitnya koordinasi antar bidang karena volume kegiatan bidang yang cukup tinggi
5. Perencanaan
- a. Pelaksanaan perencanaan dana dekonsentrasi perlu disiapkan dengan matang
  - b. Juklak/Juknis yang kurang fleksibel
  - c. Kendala di awal pelaksanaan DIPA, RKA KL yang diterima namun masih gelondongan atau belum terperinci per akun kegiatan sehingga harus dilakukan revisi kembali
  - d. Adanya perubahan sistem aplikasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan dekonsentrasi seperti pencairan, pembukuan, dan pengadministrasian lainnya pada tahun berjalan
  - e. Dalam pedoman pelaksanaan dekonsentrasi Bappenas, fokus dan arahan terhadap hasil yang akan dicapai kurang jelas
6. Administrasi
- a. SK KPA, PPK dan bendahara menjadi satu SK yang ditandatangani gubernur, sehingga ketika terjadi mutasi pejabat maka pelaksanaan kegiatan menunggu SK revisi
  - b. Penggantian bendahara pengeluaran menjadi kendala dalam perubahan administrasi kegiatan dan memerlukan waktu dalam penyesuaian tahapan kegiatan
  - c. Adanya kendala internal dikarenakan adanya penggantian kuasa pengguna anggaran sehingga memerlukan proses revisi SK dan adanya proses pergeseran dan penambahan akun baru pada RKA

## **B. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya**

Untuk mendukung pencapaian sasaran program, pada tahun 2015 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 633.470.049.000,- yang terdiri dari dana RM sebesar Rp. 393.397.042.000,- dan dana PHLN sebesar Rp 240.073.007.000,-. Realisasi penyerapan anggaran sampai dengan Maret 2015 mencapai Rp. 54.623.830.219,- (8,62%) yang terdiri dari dana RM sebesar Rp. 38.954.405.067,- (9,90%), sedangkan dana PHLN sebesar Rp. 15.669.425.152,- (6,53%).

Anggaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dikelola oleh 5 (lima) PPK di Setmen PPN/Settama Bappenas dan dipergunakan untuk

mendukung pelaksanaan kegiatan pada lingkup masing-masing UKE II. Secara rinci realisasi penyerapan anggaran pada masing-masing PPK dapat dilihat pada Tabel 19.

**TABEL 19**  
**REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN**  
**PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA**  
**TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2015**

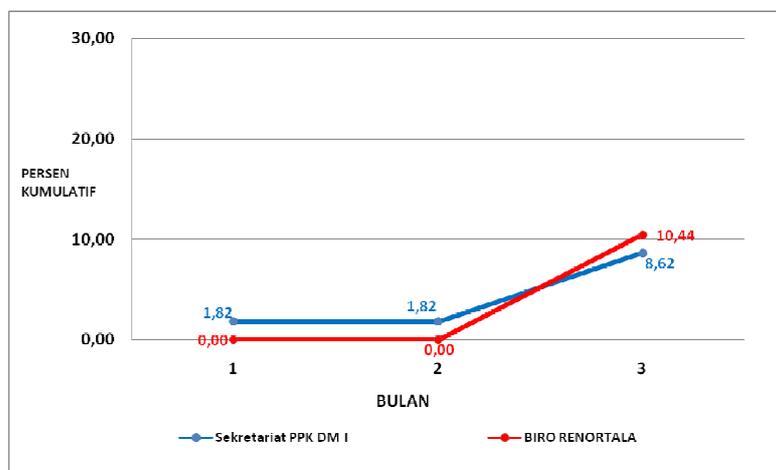
NO	PROGRAM	REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN										
		RM	%	PHLN				TOTAL		%		
				PLN	%	HLN	%	JUMLAH	%			
	<b>DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA</b>	<b>38.954.405.067</b>	<b>9,90</b>	<b>15.669.425.152</b>		<b>-</b>			<b>15.669.425.152</b>		<b>54.623.830.219</b>	<b>8,62</b>
1	<b>PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS I</b>	<b>2.560.409.239</b>	<b>2,96</b>			<b>-</b>			<b>-</b>		<b>2.560.409.239</b>	<b>2,96</b>
	a Sekretariat PPK Program DM I	2.247.078.239	2,69								2.247.078.239	2,69
	b Biro Renortala	313.331.000	10,44								313.331.000	10,44
2	<b>PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS II</b>	<b>1.041.494.035</b>	<b>4,08</b>			<b>-</b>			<b>-</b>		<b>1.041.494.035</b>	<b>4,08</b>
	a Sekretariat PPK Program DM II	36.345.000	9,57								36.345.000	9,57
	b Staf Ahli	140.775.660	4,02								140.775.660	4,02
	c Pusdatinrenbang	416.841.398	5,66								416.841.398	5,66
	d Biro Humas dan TU Pimpinan	172.349.913	2,22								172.349.913	2,22
	e Biro SDM	218.065.765	4,34			<b>-</b>			<b>-</b>		218.065.765	4,34
	f Biro Hukum	57.116.299	3,81								57.116.299	3,81
3	<b>PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS III</b>	<b>33.468.067.841</b>	<b>14,85</b>						<b>-</b>		<b>33.468.067.841</b>	<b>14,85</b>
	a Biro Umum/Sekretariat	33.468.067.841	14,85								33.468.067.841	14,85
4	<b>PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS IV</b>	<b>1.884.433.952</b>	<b>3,44</b>	<b>15.669.425.152</b>	<b>6,53</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15.669.425.152</b>	<b>6,53</b>	<b>17.553.859.104</b>	<b>5,95</b>
	a Pusbindiklatren	1.884.433.952	3,44	15.669.425.152	6,53		<b>-</b>	<b>-</b>	15.669.425.152	6,53	17.553.859.104	5,95
5	<b>PPK DANA OPERASIONAL MENTERI</b>		<b>-</b>								<b>-</b>	<b>-</b>

Sumber : Bagian Verifikasi Anggaran, Biro Umum

### 1) PPK Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PPN/Bappenas I

Alokasi anggaran pada PPK Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PPN/Bappenas I sebesar Rp. 86.519.558.000,- dan sampai dengan triwulan I 2015 telah menarik dana sebesar Rp. 2.560.409.239,- (2,96%). Secara rinci realisasi penyerapan anggaran setiap UKE II terdapat pada Tabel 19 dan perkembangan realisasi penyerapan dana setiap bulan dapat terlihat pada Gambar 13.

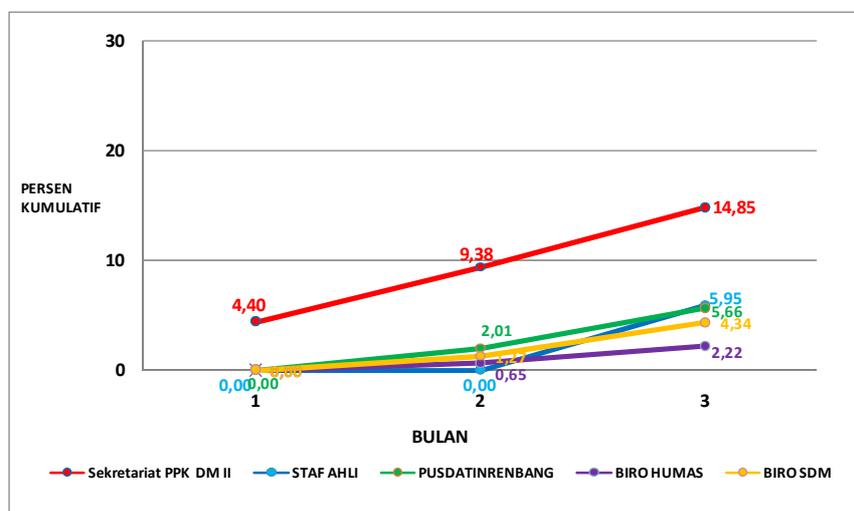
**GAMBAR 13**  
**PERKEMBANGAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN**  
**PPK DUKUNGAN MANAJEMEN I TRIWULAN I TAHUN 2015**



**2) PPK Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PPN/Bappenas II**

Alokasi anggaran pada PPK Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PPN/Bappenas II sebesar Rp. 25.521.362.000,- dan telah ditarik Rp 1.041.494.035,- (4,08%) pada 3 bulan pertama. PPK DM II mengkoordinasikan kegiatan pada Staf Ahli , Pusat Data Informasi Perencanaan Pembangunan, Biro Humas dan TU Pimpinan, Biro SDM, dan Biro Hukum. Secara rinci realisasi penyerapan anggaran setiap UKE II terdapat pada Tabel 19 dan perkembangan realisasi penyerapan dana setiap bulan dapat terlihat pada Gambar 13.

**GAMBAR 14**  
**PERKEMBANGAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN**  
**PPK DUKUNGAN MANAJEMEN II TRIWULAN I TAHUN 2015**



**3) PPK Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PPN/Bappenas III**

Alokasi anggaran pada PPK Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PPN/Bappenas III sebesar Rp. 225.399.129.000, dan telah dilakukan penarikan dana sebesar Rp. 33.468.067.841,- (14,85%).

**4) PPK Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PPN/Bappenas IV**

Alokasi anggaran pada PPK Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PPN/Bappenas IV sebesar Rp. 294.830.000.000,- yang terdiri dari Rp 54.756.993.000,- dana RM, dan dan PLN sebesar Rp. 240.073.007.000. Realisasi anggaran sebesar Rp. 15.669.425.152 (6,53%). Berikut status pelaksanaan PLN yang dikelola oleh Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana:

- a. *Professional Human Resources Development Project (PHRDP) III – JICA (IP-535)*. Alokasi tahun 2015 sebesar Rp JPY 116,667 juta (Rp 14 M). Pada triwulan I belum ada penyerapan dana karena ada keterlambatan penandatanganan kontrak DLS Paket A, yang dapat mengakibatkan pekerjaannya baru akan diselesaikan setelah *closing date*, namun proses pembayaran dilakukan sebelum *closing date*.
- b. *Professional Human Resources Development (PHRD) IV – JICA (IP-568)*. Alokasi DIPA 2015 adalah JPY 901.321,1 juta. Pada triwulan I belum ada penyerapan karena SOE terlambat disampaikan, sehingga pembayaran dana tahun 2015 di pending. Selain itu pelelangan Konsultan PHRD IV belum selesai, karena adanya permintaan penjelasan JICA yang memerlukan waktu untuk di respon oleh panitia.
- c. *Scholarship Program for Strengthening Reforming Institutions (SPIRIT) – Bank Dunia (8010-ID)*. Alokasi DIPA 2015 adalah sebesar USD 24.306.000 dan telah diserap USD 1.159.364. Pada triwulan I, masih terdapat rekening *backlog* sejumlah USD 1.034.956 (Rp 12.936.954.875) yang belum bisa dipertanggungjawabkan baik ke World Bank maupun ke GOI, hal ini disebabkan oleh perbedaan Data Rekening Koran B.I, Daftar SP2D Reksus (DSR) dan Laporan Pembebanan Reksus (LPR) dari Kantor Pengelolaan Kas Negara (PKN) Kemenkeu yang mungkin disebabkan kesalahan pada sistem SPAN.

**5) PPK Dana Operasional Menteri**

Alokasi anggaran pada PPK Dana Operasional Menteri sebesar Rp 1.200.000.000,-

### **C. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappenas**

Alokasi anggaran tahun 2015 pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappenas sebesar Rp. 40.465.872.000,- dikelola oleh PPK Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara, dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 58.080.000,- (0,14%).

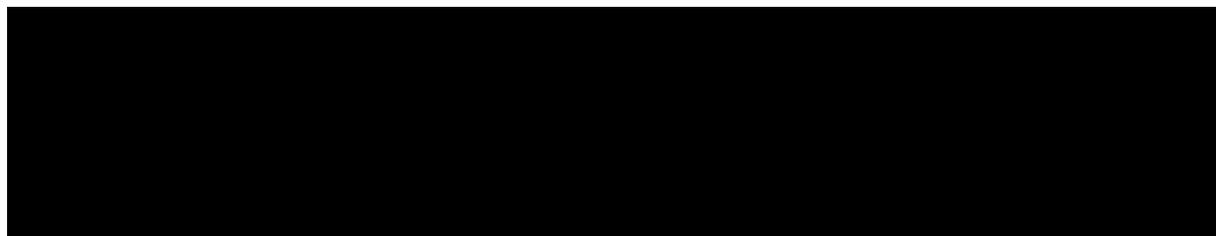
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappenas adalah untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas melalui penyediaan sarana dan prasarana kerja aparatur termasuk penyediaan sistem informasi perencanaan pembangunan nasional, pengembangan sistem data/informasi perencanaan pembangunan, dan sistem data/informasi dalam pengelolaan aset (Barang Milik Negara). Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Kantor
- 2) Peningkatan Fasilitas Pelayanan Umum dan Operasional.
- 3) Peningkatan Kualitas Pendukung Pelayanan Umum dan Operasional.

### **D. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Bappenas**

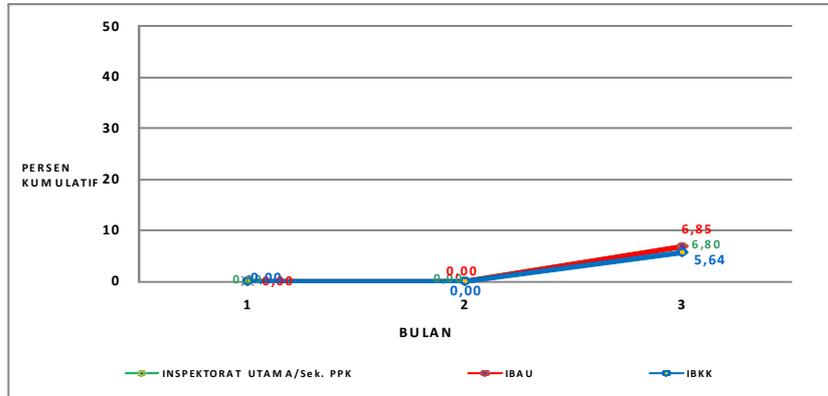
Alokasi anggaran Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Bappenas sebesar Rp. 5.275.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 337.064.008,- (6,39%) yang dikelola oleh PPK Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Bappenas. Anggaran program ini dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pada lingkup masing-masing UKE II. Secara rinci realisasi penyerapan anggaran pada setiap unit kerja dapat dilihat pada Tabel 20 dan perkembangan realisasi setiap bulan pada Gambar 13.

**TABEL 20**  
**REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN**  
**PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS**  
**APARATUR BAPPENAS TRIWULAN I TAHUN 2015**



Sumber : Bagian Verifikasi Anggaran, Biro Umum

**GAMBAR 15**  
**PERKEMBANGAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN**  
**PPK PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGAWASAN AKUNTABILITAS**  
**APARATUR BAPPENAS TRIWULAN I TAHUN 2015**



## **BAB IV KESIMPULAN**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pemantauan terhadap pelaksanaan program/kegiatan di Kementerian PPN/Bappenas sampai dengan Maret 2015 (Triwulan I), dapat disampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Alokasi anggaran Kementerian PPN/Bappenas pada tahun anggaran 2015 untuk Satker Kementerian PPN/Bappenas dan Satker MCC adalah sebesar Rp. 1.155.112.861.000,- terdiri dari dana RM sebesar Rp. 660.164.354.000,-, dan PHLN sebesar Rp. 494.948.507.000,-. Dari sejumlah dana tersebut, realisasi penyerapan anggaran sampai dengan Maret 2015 sebesar Rp. 158.637.966.903,- (13,73%), yang terdiri dari dana RM sebesar Rp. 56.780.161.149,- (8,60%), dan dana PHLN sebesar Rp. 101.857.805.754,- (20,58%).
2. Realisasi penyerapan anggaran Kementerian PPN/Bappenas sampai dengan Triwulan I masih rendah, disebabkan antara lain:
  - a. Pelaksanaan semua kegiatan di masing-masing unit kerja masih dalam tahap persiapan.
  - b. Proses revisi/perubahan DIPA yang dilakukan beberapa kali, yang proses pengusulan dan pembahasan revisi cukup memakan waktu lama.

### **B. Saran-Saran**

Berdasarkan hasil pemantauan tersebut di atas, maka dapat disampaikan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Untuk mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada saat proses perencanaan, kepada semua unit kerja pelaksana kegiatan dan PPK disarankan:
  - a. Dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal atau rencana kerja yang telah disusun.
  - b. Agar dapat mempersiapkan lebih dini dalam menyusun legalisasi administrasi kegiatan antara lain berupa surat-surat keputusan dan data pendukung lainnya.

- c. Mempelajari tatacara/pedoman dan peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan, proses pencairan anggaran, pelaporan kegiatan/program yang akan dilaksanakan.
  - d. Pencatatan kegiatan ke dalam DIPA perlu lebih diperhatikan sehingga tidak terjadi kesalahan register seperti MAK, kode kegiatan yang mengakibatkan perlu dilaksanakan revisi DIPA.
2. Untuk kelancaran proses pencairan, khususnya kepada pihak Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penerbit SPM serta para petugas pendukungnya agar dapat berkoordinasi dan memberikan informasi yang cepat, tepat, dan akurat kepada unit kerja yang mengusulkan (melalui PPK) jika terdapat hal-hal yang perlu segera diperbaiki/disempurnakan/diselesaikan dalam proses pengajuan usulan pencairan dana. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya keterlambatan proses pencairan sehingga waktu yang dibutuhkan dalam proses pencairan menjadi lebih cepat, dan sesuai dengan rencana.
  3. Penyampaian laporan data realisasi penyerapan anggaran harus tetap konsisten berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) setiap bulannya (sampai dengan akhir bulan).
  4. Perlu meningkatkan koordinasi dengan KPPN, Kanwil Perbendaharaan dan Ditjen Anggaran dalam aplikasi SPAN sehingga pencairan dana tidak mengalami keterlambatan.
  5. Perlunya konsep perencanaan yang matang, jelas dan terukur dalam penggunaan anggaran. Sehingga penggunaan anggaran akan tepat sasaran dan indikator kinerja yang direncanakan akan tercapai.